



# PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

## LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2025



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
JL. CIKINI RAYA NO.117 JAKARTA PUSAT  
KODE POS 10330

☎ 021-31966136

🌐 [pttun.jakarta@gmail.com](mailto:pttun.jakarta@gmail.com)

✉ [pttun.jakarta.117](mailto:pttun.jakarta.117)

## KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025, yang merupakan Rangkaian Kinerja dalam kurun waktu awal Januari sampai dengan Akhir Desember 2025.

Penyusunan Laporan Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban dalam pelaksanaan tugas fungsi juga sebagai bahan Laporan dan Evaluasi, baik bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun Sewilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang prosedur penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16516/SEK/OT1.6/XII/2025 tanggal 30 Desember 2025 perihal Penyusunan Laporan Kegiatan Tahun 2025.

Dalam Laporan kegiatan ini kami sampaikan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama tahun 2025, dengan harapan akan mendapatkan penilaian dan bimbingan guna penyempurnaan penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada masa yang akan datang.

Dengan tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 ini kami ucapkan terima kasih kepada semua warga Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang telah melaksanakan tugas dengan sungguh -sungguh dan penuh tanggung jawab demi terwujudnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung.

Jakarta, 06 Februari 2026

Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Jakarta

KE T U A,



H. SWAN HERWIN, S.H. M.H.  
NIP. 19590215 198612 1 001

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
	<b>A. LATAR BELAKANG .....</b>	<b>1</b>
	<b>B. KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN FUNGSI .....</b>	<b>3</b>
	1. Kedudukan PT.TUN Jakarta .....	3
	2. Wewenang dan Fungsi PT.TUN Jakarta .....	6
	<b>C. VISI DAN MISI .....</b>	<b>8</b>
	<b>D. RENCANA STRATEGIS .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB II</b>	<b>PERKARA .....</b>	<b>10</b>
	<b>A. KEADAAN PERKARA.....</b>	<b>10</b>
	1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama .....	10
	2. Keadaan Perkara Tingkat Banding .....	12
	3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi .....	13
	4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali .....	14
	<b>B. PENYELESAIAN PERKARA .....</b>	<b>15</b>
	1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus .....	16
	2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu.....	19
	3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi, dan PK .....	20
	<b>C. PROGRAM PRIORITAS NASIONAL.....</b>	<b>22</b>
	1. Posbakum.....	22
	2. Pelayanan Terpadu .....	24
	3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) .....	25
<b>BAB III</b>	<b>SUMBER DAYA MANUSIA .....</b>	<b>27</b>
	A. Mutasi .....	28
	B. Promosi .....	28
	C. Pensiun .....	29
	D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat	29
<b>BAB IV</b>	<b>PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI .....</b>	<b>30</b>
	<b>A. Pengelolaan Keuangan.....</b>	<b>31</b>
	DIPA 01 .....	31
	Realisasi .....	31
	Laporan Keuangan Perkara.....	31
	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).....	32
	<b>B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana.....</b>	<b>36</b>
	Tanah .....	36
	Rumah Dinas .....	42
	<b>C. Pengelolaan Teknologi Informasi .....</b>	<b>43</b>

	1. Implementasi e-Court.....	43
	2. Implementasi SIPP .....	48
<b>BAB V</b>	<b>PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK .....</b>	<b>54</b>
	A. Akreditasi Penjaminan Mutu .....	54
	B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).....	60
	C. Inovasi Pelayanan Publik.....	61
<b>BAB VI</b>	<b>PENGAWASAN.....</b>	<b>85</b>
	A. Internal .....	85
	B. Evaluasi .....	89
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>91</b>
	A. Kesimpulan .....	91
	B. Rekomendasi.....	93

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini pada intinya berisi program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mencakup peradilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam kurun waktu tahun anggaran 2025.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini dapat menjadi pendorong, evaluasi dan introspeksi untuk dapat melakukan yang terbaik dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, khususnya dari para pencari keadilan.

Besar harapan kami, semoga Laporan ini dapat memberikan gambaran dan informasi mengenai program dan kegiatan serta keadaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,serta dapat memberikan manfaat bagi seluruh jajaran peradilan dan pihak-pihak yang terkait.

Sebagai manusia biasa tentunya kami menyadari betul bahwa Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini masih jauh dari apa yang diharapkan, untuk itulah kiranya dapat diberikan petunjuk sebagai bahan evaluasi dalam kesempurnaan laporan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Reformasi yang telah lama bergulir hingga kini masih mengisahkan sejumlah agenda, termasuk reformasi di dunia peradilan. Banyaknya keluhan masyarakat akan lambannya reformasi peradilan merupakan sesuatu hal yang tidak dapat kita pungkiri keberadaannya. Peradilan sebagai lembaga terhormat yang seyogyanya harus dihormati masyarakat kerap mendapat sorotan negatif dari berbagai kalangan, integritas, kualitas dan kinerja lembaga peradilan dipertanyakan oleh sebagian pihak.

Ditengah derasnya sorotan dan kritikan-kritikan tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memiliki konsep dan pendirian untuk berbuat dari hal yang terkecil menuju suatu paradigma baru, terlepas dari semua permasalahan yang ada di dunia peradilan berpendirian bahwa segala upaya yang telah dilakukan maupun yang sedang dilakukan sekarang ini masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, karena itu kerja keras berbagai pihak dari Ketua Pengadilan sampai unsur terkecil dibawahnya dituntut untuk lebih ditingkatkan dimasa-masa mendatang, peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tetap menjadi prioritas sebagai salah satu wujud layanan prima yang ditekankan oleh Mahkamah Agung.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan salah satu badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dibentuk pada Tahun 1990 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990, tanggal 30 Oktober 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Jakarta, Medan dan Ujung Pandang (sekarang Makassar) sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

## **B. KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN FUNGSI**

### **1. Kedudukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Peresmian gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dilakukan pada tanggal 10 November 1990 oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia H. Ismail Saleh, S.H. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menempati bekas gedung Pengadilan Tinggi Jakarta yang terletak di jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat yang diberikan oleh Mahkamah Agung secara pinjam pakai kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Surat Persetujuan Pemakaian Nomor KMA/242/IX/89 tanggal 6 September 1989. Peresmian operasionalnya dilakukan pada tanggal 14 Januari 1991.

Gedung kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengalami beberapa kali renovasi antara lain, pada tahun 2021 berupaya peningkatan bagian belakang seluas 9 x 12 x 1 m<sup>2</sup> kemudian pada tahun 2008 berupaya peningkatan ruang Ketua, ruang Panitera/Sekretaris dan Ruang Hakim. Terakhir pada tahun 2012 dilaksanakan pembangunan ulang gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama ± 3 tahun anggaran yang terdiri dari 3 lantai.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding awal terbentuknya, membawahi 8 (delapan) wilayah propinsi yang menjadi yuridiksinya yaitu:

- ◆ 1. DKI Jakarta
- ◆ 2. Jawa Barat
- ◆ 3. Banten
- ◆ 4. Kalimantan Timur
- ◆ 5. Kalimantan Selatan
- ◆ 6. Kalimantan Barat
- ◆ 7. Kalimantan Utara
- ◆ 8. Kalimantan Tengah

Dari delapan propinsi tersebut masih ada satu propinsi yang belum dibentuk yaitu propinsi Kalimantan Utara sehingga sengketa yang timbul di propinsi tersebut masih dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Kemudian pada akhir tahun 2022 yuridiksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengalami perubahan untuk pengadilan tingkat pertamanya, ini dikarenakan di wilayah Kalimantan Selatan dibentuk Pengadilan tingkat banding yang baru berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2021 yaitu Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Banjarmasin. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin membawahi Wilayah Hukum Pengadilan tingkat pertama yang mengalami pergantian tingkat bandingnya adalah:

- ◆ Pengadilan Tata usaha Negara Banjarmasin
- ◆ Pengadilan Tata usaha Negara Pontianak
- ◆ Pengadilan Tata Usaha Negara samarinda
- ◆ Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

Ke 4 (empat) Pengadilan Tata usaha Negara tersebut dibawah koordinasi wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, sehingga dengan adanya perubahan tersebut wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menjadi:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

## Peta wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta:

### 1. Propinsi DKI, Propinsi Jawa Barat, dan Banten



#### a. Provinsi DKI Jakarta



#### b. Provinsi Jawa Barat



### c. Provinsi Serang Banten



## 2. Wewenang dan Fungsi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Bahwa setiap Lembaga Peradilan melaksanakan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan independent, tidak memihak dan kompeten merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum, namun demikian atau bukan berarti prinsip-prinsip independensi atau tersebut dapat mengesampingkan prinsip akuntabilitas maupun transparansi, karenanya warga peradilan haruslah mempunyai pemahaman yang memadai dalam menilai hal tersebut.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama merupakan kekuasaan yang merdeka yang tidak dapat dicampuri oleh kekuasaan lainnya. Pasal 2 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Lebih lanjut menyatakan untuk mewujudkan kemerdekaan dan kemandirian lembaga peradilan, maka

selanjutnya lembaga peradilan yang benar-benar berwibawa, bermartabat dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercipta lembaga peradilan yang sesuai dengan dambaan dan harapan masyarakat.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini yang disampaikan ke Mahkamah Agung RI, merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dan merupakan salah satu metode untuk menciptakan *checks and balances* sekaligus mekanisme untuk menilai atau mengevaluasi seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang serta kegiatan-kegiatan lainnya, dengan adanya mekanisme Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang baik, masyarakatpun dapat ikut memantau kemampuan dan kinerja lembaga peradilan.

Untuk dapat mewujudkan tujuan tersebut di era reformasi ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam kurun waktu yang ke ± 32 tahun sejak berdirinya, telah melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat diketahui dari Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ini.

Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijaksanaan umum peradilan, yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana diuraikan dalam *Blueprint* Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sebuah pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

### **C. VISI DAN MISI**

#### ➤ **Visi:**

Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah “***Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang Agung***”.

#### ➤ **Misi:**

Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dirumuskan sebagai berikut :

1. Menciptakan kemandirian Lembaga Badan Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Meningkatkan pelayanan Prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan (Justisiabel);
3. Meningkatkan profesionalisasi aparatur Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Meningkatkan kualitas kepemimpinan aparatur Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Meningkatkan kredibilitas, akuntabilitas dan transparansi.

### **D. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis dapat diartikan sebagai suatu pengarahan serta pemikiran untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui kebijakan yang dibuat oleh unsur pimpinan.

Bahwa Sasaran (target) Strategis yang diinginkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah berupa hasil yang akan dicapai secara nyata dari suatu kegiatan (Program) yang telah ditetapkan tersebut yaitu :

1. Peningkatan penyelesaian perkara.
2. Peningkatan tertib administrasi perkara.
3. Peningkatan kualitas pengawasan.
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap putusan.
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

6. Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
8. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara.

Rencana Strategis pada dasarnya merupakan pemetaan masalah, diharapkan seluruh kegiatan pelaksanaan tugas teknis yudisial maupun non yudisial dapat dilakukan dengan baik serta dapat menjadi pedoman pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), sehingga hambatan-hambatan untuk mencapai tujuan dapat diminimalisir. Terlebih lagi dengan dibentuknya Hakim Tinggi Pengawas Bidang (Hatiwasbid) dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) dapat memperkuat pelaksanaan Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

**BAB II**  
**KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA**  
**JAKARTA**

**A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA DAN SEWILAYAH PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

**1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Keadaan Perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selama ini selain menyelesaikan perkara tingkat banding yang dimohonkan banding dari 3 (tiga) satuan kerja di wilayah Hukumnya juga menyelesaikan sengketa ditingkat pertama berdasarkan Pasal 48 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah 2 kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009.

Sebagai pengadilan tingkat pertama selama periode Januari sampai dengan Desember 2025 telah menerima perkara gugatan sebanyak 79 Perkara ( 15 + 64 ) (sisa awal dan perkara masuk tahun 2024), dari jumlah perkara gugatan tersebut, yang telah diputus sebanyak 53 Perkara sisa 26 Perkara, dengan perincian sebagai berikut :

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Pada akhir tahun 2024 PTUN Jakarta mempunyai sisa perkara sebanyak 154 Perkara, dan pada tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menerima perkara masuk 449 Perkara, perkara yang dicabut 112 perkara, perkara yang di putus 344 perkara, Dismissal 35 perkara, Perlawanan 5 perkara, dan sisa perkara 117 perkara.

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2024 terdapat Sisa 13 (tiga belas) perkara, tahun 2025 menerima Perkara masuk 96 (sembilan puluh enam) Perkara, sehingga Perkara yang harus diselesaikan tahun 2024 adalah 109 (seratus sembilan), selama tahun 2024 telah diputus 100 (seratus) Perkara yang terinci putus karena dicabut 55 (lima puluh lima) Perkara, dismissal 7 (tujuh) Perkara, perlawanan 1 (satu) perkara, sedangkan 38 (tiga puluh delapan) perkara diputus biasa, sehingga sisa perkara tahun 2025 sebanyak 9 (sembilan) perkara.

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Pertama Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung**

Pada akhir tahun 2024 PTUN Bandung mempunyai sisa perkara sebanyak 70 Perkara dan pada tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menerima perkara masuk 247 Perkara, perkara yang putus dalam sidang 141 perkara, putus sebelum persidangan 79 perkara, dismissal 40 perkara dan perlawanan 5 perkara.

**2. Keadaan Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan SeWilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Banding Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding selama periode Januari sampai dengan Desember 2025 telah menerima perkara banding sebanyak 390 Perkara ( 41 + 349 ) (sisa awal dan perkara masuk tahun 2025), sedangkan

perkara banding yang telah diputus sebanyak 339 Perkara dan sisanya 51 Perkara, dengan perincian sebagai berikut:

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dari 86 perkara yang diputus di tahun 2025, 86 perkara melakukan upaya hukum Banding.

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Sisa Perkara Banding pada tahun 2024 sebanyak 60 Perkara, dan pada tahun 2025 PTUN Jakarta menerima perkara banding yang sebanyak 239 Perkara, perkara banding dicabut 0 perkara, perkara yang diputus 229 Perkara, sisa perkara banding 70 perkara.

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2024 terdapat sisa perkara banding 11 (Sebelas) Perkara, pada tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima perkara banding 20 (dua puluh) perkara, perkara banding yang dicabut 0 (Nol) perkara, perkara banding yang diputus 21 (dua puluh satu) perkara dan sisa perkara banding tahun 2025 ada 9 (sembilan) Perkara.

**3. Keadaan Perkara Kasasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan SeWilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selain sebagai pengadilan tingkat banding juga sebagai pengadilan tingkat pertama, berkas perkara yang proses awalnya terdaftar di tingkat pertama telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan apabila ada para pihak yang merasa tidak puas atas putusan Majelis Hakim yang memeriksanya, dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung R.I.,

melalui Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, untuk mendaftarkan permohonan Kasasi, dihitung dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, apabila para pihak hadir dalam ucapan amar putusan, sedangkan apabila para pihak tidak hadir dihitung sejak tanggal pemberitahuan amar putusan (teori pengiriman), berikut ini perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi periode Januari sampai dengan Desember 2025 sebanyak 60 Perkara ( 15 + 45 ) (sisa awal dan perkara masuk tahun 2025), sedangkan perkara kasasi yang telah diputus sebanyak 25 Perkara dan sisanya 35 Perkara.

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menerima perkara kasasi masuk 72 (Tujuh Puluh Dua ) perkara

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Sisa Perkara Kasasi pada tahun 2024 sebanyak 344 perkara pada tahun 2025 PTUN Jakarta menerima perkara Kasasi masuk sebanyak 190 perkara, perkara Putus 309 perkara, sisa perkara 215 perkara.

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Kasasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2024 terdapat sisa perkara kasasi 4 (empat) perkara, pada tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima perkara kasasi masuk 17 (tujuh belas) perkara, perkara Kasasi yang dicabut 2 (dua) perkara, putus kasasi 8 (delapan) perkara, sisa perkara kasasi tahun 2025 sisa kasasi 11 (Sebelas) perkara

**4. Keadaan Perkara Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan SeWilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Pada tahun 2025 di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada proses pemeriksaan Peninjauan Kembali yaitu berkas perkara yang khusus diajukan proses awalnya terdaftar di tingkat pertama dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang telah diputus upaya hukum di tingkat kasasi, apabila ada para pihak yang tidak puas atas putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. tersebut, dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) melalui Kepaniteraan Muda Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang dihitung dalam tenggang waktu selama 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal pemberitahuan amar putusan kasasi, apabila ada bukti baru (Novum) dihitung sejak diketemukan bukti baru (novum) tersebut untuk mendaftarkan permohonan Peninjauan Kembali, berkas perkara Peninjauan Kembali periode Januari sampai dengan Desember 2025 sebanyak 11 Perkara ( 6 + 5) (sisa awal dan perkara masuk tahun 2025),

sedangkan perkara Peninjauan Kembali yang telah diputus sebanyak 4 Perkara dan sisanya 7.

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung**

Keadaan perkara Peninjauan Kembali tahun 2025 yang diterima selama periode bulan Januari s.d Desember 2025 sebanyak 26 perkara, sisanya sebanyak 6 perkara masih dalam proses penyelesaian pengiriman berkas, sedangkan berkas peninjauan kembali yang dikirim selama periode Januari s.d Desember 2025 sebanyak 20 perkara

➤ **Keadaan Perkara**

➤ **Tingkat Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Jumlah Perkara Kasasi di Tahun 2025 sejumlah 190 Perkara, dikurangi Perkara Permohonan PK sebanyak 140 Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum PK sebanyak 50 Perkara.

➤ **Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2024 terdapat sisa perkara Peninjauan kembali sebanyak 4 (empat) perkara, pada tahun 2025, Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menerima perkara peninjauan kembali 3 (tiga) perkara, putus ada 4 (empat) perkara, sehingga sisa perkara peninjauan kembali tahun 2025 ada 1 (satu) perkara.

## **B. PENYELESAIAN PERKARA**

### **1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus Berdasarkan Jenis Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan SeWilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

➤ **Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding, juga sebagai pengadilan tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 48 jo Pasal 51 ayat 3 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding, selama periode Januari sampai dengan Desember 2025 telah menerima perkara banding sebanyak 390 perkara ( 41 + 349 ) (sisa awal dan perkara masuk tahun 2025) dan telah diputus sebanyak 339 perkara. Sisanya sebanyak 51 perkara.

**Kinerja Penanganan Perkara Banding Pengadilan Tinggi TUN**

**Jakarta**

**Tahun 2025**

No.	Jenis Perkara	Sisa	Masuk	Jlh	Putus	Cabut	Sisa 2025	Sumber Data
1.	Pertanahan	12	111	123	85	107	16	Panitera Muda Hukum PT TUN Jakarta
2.	Kepegawaian	2	29	31	9	27	4	
3.	Perizinan	4	46	50	94	46	4	
4.	Lingkungan Hidup	0	2	2	2	2	-	
5.	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa/Pajak/Lelang	0	3	3	2	2	1	
6.	Badan Hukum/ Parpol	1	44	45	0	35	10	
7.	Kepala Desa dan Perangkat Desa	0	0	0	0	0	0	
8.	Kepala Daerah	0	0	0	0	0	0	
9.	Proses Pemilu	0	0	0	0	0	0	
10.	PAW	0	1	1	1	0	0	
11.	Ketenagakerjaan	0	0	0	0	0	0	
12.	Keterbukaan Informasi Publik	0	0	0	0	0	0	
13.	Pengadaan Tanah	0	0	0	0	0	0	
14.	Fiktif Positif	0	0	0	0	0	0	

15.	Penyalahgunaan Wewenang	0	0	0	0	0	0	
16.	Tindakan Administrasi Pemerintah	11	39	50	35	46	4	
17.	Lain-lain	11	75	86	71	74	12	
	Jumlah	41	349	390	314	339	51	

➤ **Jumlah Sisa Perkara Yang Putus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tahun 2025 terdapat 608 Perkara, sisa dari jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 117 Perkara.

**Rincian dari jenis sisa perkara adalah sebagai berikut :**

NO.	JENIS PERKARA	SISA PERKARA
<b>A</b>	<b>GUGATAN</b>	
1	Pertanahan	10
2	Kepegawaian	7
3	Perijinan	8
4	Lingkungan Hidup	3
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	0
6	Badan Hukum/ Parpol	21
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	0
8	Kepala Daerah	0
9	Proses Pemilihan Umum	0
➤ 10	Penggantian Antar Waktu	1
11	Ketenagakerjaan	0
12	Sengketa Informasi Publik/KIP	8
13	Pengadaan Tanah	0
14	Fiktif Positif	0
15	Penyalahgunaan Wewenang	0
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	12
17	Merek	2
18	Lain Lain	45
	<b>JUMLAH</b>	<b>117</b>

### **Sisa Perkara yang Diputus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2024 masih terdapat sisa 13 (tiga belas ) perkara, tahun 2025 perkara masuk 96 (sembilan puluh enam) perkara, sehingga selama tahun 2024 jumlah perkara yang harus diselesaikan 109 (seratus sembilan) perkara, dari jumlah tersebut telah diselesaikan sebanyak 100 (seratus) perkara dapat dilihat pada tabel berikut:

<b>No.</b>	<b>Jenis Perkara</b>	<b>Sisa Perkara</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A	GUGATAN	
1	Pertanahan	81
2	Kepegawaian	4
3	Perijinan	
4	Lingkungan Hidup	-
5	Tender/Pengadaan Barang dan Jasa	-
6	Badan Hukum/Parpol	-
7	Kepala Desa dan Perangkat Desa	1
8	Kepala Daerah	-
9	Proses Pemilihan Umum	-
10	Penggantian Antar Waktu	5
11	Ketenagakerjaan	-
12	Sengketa Informasi Publik (KIP)	-
13	Pengadaan Tanah	-
14	Fiktif Positif	-
15	Penyalahgunaan Wewenang	-
16	Tindakan Administrasi Pemerintahan	2
17	Merek	-
18	Lain-lain	7
<b>JUMLAH</b>		<b>100</b>

## **2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan SeWilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

### **➤ Jumlah Sisa Perkara yang Diputus Tepat Waktu pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pengadilan tingkat banding telah memutus Pada tahun 2025 terdapat Perkara yang Putus Kurang dari 3 (tiga) Bulan sejumlah 338 (tiga ratus tiga puluh delapan) Perkara, perkara yang putus lebih dari 3 bulan sejumlah 1 (satu), dari jumlah Perkara yang diselesaikan sebanyak 339 (tiga ratus tiga puluh sembilan ) Perkara.

### **➤ Jumlah Sisa Perkara yang Diputus Tepat Waktu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Dari perkara-perkara yang telah diselesaikan selama tahun 2025 sebanyak 491 Perkara, Perkara yang Putus Kurang dari 3 ( Tiga ) Bulan sejumlah 170 Perkara, Perkara yang putus 3 ( Tiga ) sampai dengan 5 (Lima) bulan sejumlah 208 Perkara, dan Perkara putus 5 ( Lima ) sampai dengan 12 ( Dua Belas ) Bulan sejumlah 113 Perkara.

### **➤ Jumlah Sisa Perkara yang Diputus Tepat Waktu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung**

Proses penanganan perkara pada Pengadilan tingkat pertama sesuai dengan SOP adalah selama 150 hari kalender semenjak perkara tersebut didaftarkan di pengadilan tingkat pertama. Terdapat 140 perkara yang sudah di putus pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung selama kurun waktu 2025.

➤ **Jumlah Sisa Perkara yang Diputus Tepat Waktu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2025 terdapat Perkara yang Putus Kurang dari 3 (tiga) Bulan sejumlah 63 (enam puluh tiga) Perkara, Perkara yang putus 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) Bulan sejumlah 28 (dua puluh delapan) Perkara, dan Perkara putus 5 (lima) sampai dengan 12 (dua belas) sejumlah 9 (Sembilan) perkara dari jumlah Perkara yang diselesaikan sebanyak 100 (seratus) Perkara.

**3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan PK**

➤ **Jumlah Sisa Perkara yang Tidak Mengajukan Hukum Kasasi dan PK pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Terhadap Putusan Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Sebagai Peradilan Tingkat Banding dan Sebagai Peradilan Tingkat Pertama memutus perkara Pada Tahun 2025, Sebagai Tingkat Banding memutus perkara sebanyak 0 Dan sebagai peradilan tingkat pertama memutus perkara sebanyak 0

**Jumlah Sisa Perkara yang Tidak Mengajukan Hukum Kasasi dan PK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

• **Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding**

Jumlah Perkara Putus Tahun 2025 sejumlah 491 Perkara, dikurangi Perkara Permohonan Banding sebanyak 239 Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum Banding sebanyak 252 Perkara.

- **Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Jumlah sisa Perkara banding tahun 2024 sejumlah 60 Perkara, Perkara yang dimohonkan Banding di Tahun 2025 sejumlah 239 Perkara, dan Perkara putus Banding tahun 2025 sejumlah 229 Perkara, dikurangi Perkara Permohonan Kasasi sebanyak 190 Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum Kasasi sebanyak 39 Perkara.

**Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali ( PK )**

Jumlah sisa Perkara Kasasi di Tahun 2024 sejumlah 344 Perkara yang dimohonkan Kasasi di Tahun 2025 sejumlah 190 Perkara, dan Perkara Putus Kasasi Tahun 2025 sebanyak 309 dikurangi Perkara Permohonan PK sebanyak 140 Perkara, jadi perkara yang tidak mengajukan hukum PK sebanyak 169 Perkara.

➤ **Jumlah Sisa Perkara yang Tidak Mengajukan Hukum Kasasi dan PK pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**

1. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding 72 perkara.
2. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi 9 perkara.
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK) 13 perkara

### **C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

#### **- Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi Iso Pengadilan)**

Pada tahun 2015 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mendapatkan Sertifikasi ISO Pengadilan yang mana pelaksanaan perpanjangan sertifikasi Sistem Manajemen ISO 9001-2009 untuk ruang lingkup Penyelenggaraan dan Pelayanan Hukum Lainnya di Pengadilan dari Lembaga Sertifikasi TUV NORD Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

Register Sertifikat	: 16.00 A 16001
No. Audit Report	: 1-A 16001/2016
Diterima	: 06 Januari 2016
Berlaku sampai	: 22 September 2016
Masa Berlaku Asli	: 5 Januari 2020.

#### **- Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah.**

Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mendapatkan Serifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan terakreditasi nilai excellent dikeluarkan pada tanggal 06 September 2018 Nomor : TAPM.14-TUN/QMR/SERTIFIKAT/9/2018, yang ditanda tangani oleh Dr. Mulyono, SH.SIP.MH. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I.

Untuk Satuan kerja yang telah mendapat sertifikat penjaminan mutu se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu :

**A.** Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mendapatkan Sertifikat Penjaminan Mutu yaitu antara lain sertifikat ISO, sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Sertifikat WBK

dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

- B.** Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mendapatkan Sertifikat Penjaminan Mutu yaitu antara lain sertifikat ISO, sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Sertifikat WBK dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- C.** Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mendapatkan Sertifikat Penjaminan Mutu yaitu sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu ISO dan Sertifikat Akriditasi Penjaminan Mutu dari Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

- **WBK**

Pada hakekatnya adanya Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance). Adanya Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Penerapan sistem manajemen mutu di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta meningkatkan pelayanan publik.

- **Posbakum,**

Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada Pengadilan (biasanya untuk pengadilan Tingkat Pertama) bagi advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk mengisi formulir permohonan bantuan hukum yaitu bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dikarenakan tidak adanya permohonan pada Perkara Prodeo tahun 2025 maka nilai kinerja anggaran baik maka untuk perkara Prodeo ditarik oleh Dirjen Badimiltun.

Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Serang melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dengan jumlah layanan dalam DIPA sebanyak 288 Jam Layanan dengan Biaya sebesar Rp28.800.000,- (*Tiga puluh tiga juta rupiah*) dengan target volume sebanyak 96 orang yang seluruhnya dibiayai dari anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA-05) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang.

Dalam Tahun 2025 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah merealisasikan pelaksanaan Posbakum dengan jumlah layanan 100 orang Layanan dengan Biaya sebesar Rp. 33.000.000,- yang seluruhnya dibiayai dari anggaran DIPA 05 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta

- **Sidang Keliling/Pelayanan terpadu**

Sidang Keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor Pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan menghemat biaya. Manfaat sidang keliling sendiri adalah lokasi sidang lebih dekat dengan

tempat tinggal yang mengajukan perkara, selain itu juga biaya transportasi lebih ringan dan menghemat waktu.

Pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sampai saat ini tidak ada acara pelaksanaan sidang keliling atau sidang yang dilaksanakan di luar kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

- **Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)**

Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara ) adalah proses berperkara di Pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan landasan hukumnya adalah :

1. Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
2. Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Peradilan Tata Usaha Negara.

Untuk tahun 2025 ini, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menerima 1 Perkara

Selama periode tahun 2025 jumlah perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan biaya Cuma-Cuma / Prodeo sebanyak 1 Perkara dan tidak ada realisasi maka untuk perkara prodeo ditarik oleh Pusat atau Dirjen Badimiltun.

Anggaran Perkara Prodeo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025 berdasarkan DIPA Nomor : SP DIPA-005.05.2.526733/2025 tanggal 02 Desember 2024 terdapat anggaran belanja biaya Perkara Prodeo untuk 1 (satu) perkara sebesar Rp. 405.000,-

Untuk tahun anggaran 2025 melalui DIPA-05 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara, Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara telah melalui sosialisasi di berbagai sarana (cetak banner, pamflet, dan melalui siaran radio daerah).

**B A B III**  
**SUMBER DAYA MANUSIA**

Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) berdasarkan  
Kepangkatan / Golongan / Pendidikan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha  
Negara Jakarta pada tahun 2025 :

**SDM Pengadilan Tinggi TUN Jakarta tahun 2025**

No	Kepangkatan	Gol/ Ruang	J K		Jenis Pendidikan							JML
			L	P	S 3	S 2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1.	Pembina Utama	IV E	9		1	6	2	-	-	-	-	9
2.	Pembina Utama Madya	IV D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Pembina Utama Muda	IV C	2	-	-	1	1	-	-	-	-	2
4.	Pembina Tk. I	IV B	2	-	-	1	1	-	-	-	-	2
5.	Pembina	IV A	4	3		6	1	-	-	-	-	7
6.	Penata Tk. I	III D	8	9	-	-	17	-	-	-	-	17
7.	Penata	III C	2	2	-	-	4	-	-	-	-	4
8.	Penata Muda Tk.I	III B	1	4	-	-	4	1	-	-	-	5
9.	Penata Muda	III A	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
10.	Pengatur Tk.I	II D	-	-	-	-		-	-	-	-	-
11.	Pengatur	II C	-	2	-	-		2				2
12.	Pengatur Muda Tk I	II B	2	-	-	-	1	-	1	-	-	2
13.	Pengatur Muda	II A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Juru TK I	I D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Juru	I C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	Juru Muda Tk. I	I B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Juru Muda	I A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah			30	21								51

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

**SDM Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan  
Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Jakarta  
Tahun 2025**

No	Nama Satker	Jumlah Pegawai	PPNPN	Total
1.	Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	80	-	80
2.	Pengadilan TUN Jakarta	66	10	76
3.	Pengadilan TUN Bandung	68	1	67
4.	Pengadilan TUN Serang	55	1	56

**Mutasi Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi TUN Jakarta  
Dan Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Jakarta  
Tahun 2025**

Mutasi Hakim dan Pegawai di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan sewilayah Satuan Kerja yaitu sebagai berikut :

No	Nama Satker	Jumlah Mutasi Masuk	Jumlah Mutasi Keluar
1.	Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	2	-
2.	Pengadilan TUN Jakarta	16	29
3.	Pengadilan TUN Bandung	8	24
4.	Pengadilan TUN Serang	7	1

**Promosi Hakim dan Pegawai Pengadilan Tinggi TUN Jakarta  
Dan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Jakarta  
Tahun 2025**

No	Nama Satker	Jumlah Promosi Masuk	Jumlah Promosi Keluar
1.	Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	3	2
2.	Pengadilan TUN Jakarta	1	-

3.	Pengadilan TUN Bandung		20
4.	Pengadilan TUN Serang	-	1

**Pengangkatan Menjadi Aparatur Sipil Negara Pengadilan TUN Jakarta  
Dan Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Jakarta  
Tahun 2025**

No	Nama Satker	Jumlah Pengangkatan ASN	Ket
1.	Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	36	-
2.	Pengadilan TUN Jakarta	12	-
3.	Pengadilan TUN Bandung	15	-
4.	Pengadilan TUN Serang	12	-

**Pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan  
Satuan Kerja yang menjalani Masa Pensiun  
Tahun 2025**

No	Nama Satker	Jumlah Pensiun	Ket
1.	Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	3	-
2.	Pengadilan TUN Jakarta	2	-
3.	Pengadilan TUN Bandung	2	-
4.	Pengadilan TUN Serang	1	-

**Pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan  
Satuan Kerja yang Mengikuti Diklat Sumber Daya Manusia (SDM)  
Tahun 2025**

No	Nama Satker	Jumlah Peserta Diklat	Ket
1.	Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	23	-
2.	Pengadilan TUN Jakarta	30	-
3.	Pengadilan TUN Bandung	22	-
4.	Pengadilan TUN Serang	41	-

Pada Tahun Anggaran 2025 Ketua Pengadilan Tinggi telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan pimpinan dalam rangka mengelola dan menata Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan mengeluarkan Surat-surat Keputusan dan Surat Perintah Tugas sebagai berikut :

**BAB IV**  
**PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA DAN**  
**TEKNOLOGI INFORMASI**

**A. PENGELOLAAN KEUANGAN**

1. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung RI :

Realisasi Anggaran bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 adalah sebesar Rp. 13.963.477.000,- (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) yaitu terdiri :

- a) Belanja Pegawai :

Pagu	: Rp.	11.229.200.000
Realisasi	: Rp.	11.157.566.105
Sisa	: Rp.	71.633.895

- b) Belanja Barang :

Pagu	: Rp.	71.633.895
Realisasi	: Rp.	2.732.956.537
Sisa	: Rp.	74.838.463

- c) Belanja Modal :

Pagu	: Rp.	1.500.000.000
Realisasi	: Rp.	1.499.554.509
Sisa	: Rp.	445.491

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung RI. Yaitu :

Pagu	: Rp.	51.940.000
Realisasi	: Rp.	51.911.160
Sisa	: Rp.	28.840

**Pengelolaan Keuangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Sewilayah Satuan Kerja adalah sebagai berikut :**

Nama Satker	Belanja Pegawai			Belanja Barang		
	Pagu	Realisasi	Sisa	Pagu	Realisasi	Sisa
PTUN Jakarta	13.465.441.000	12.520.923.427	944.517.573	2.767.724.000	2.749.825.411	17.898.589
PTUN Bandung	11.866.022.000	11.742.281.597	123.740.403	1.877.208.000	1.848.007.622	29.200.378
PTUN Serang	10.658.749.000	10.520.138.906	76.164.000	1.913.022.000	1.832.446.672	80.575.328

**3. PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA :**

**Pengelolaan Keuangan Perkara Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Sewilayah Satuan Kerja adalah sebagai berikut :**

**Laporan Tahunan Keuangan Perkara Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2025**

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1.	Sisa Awal	Rp. 4.443.350	
2.	Penerimaan bulan ini	Rp. 87.250.000	
3.	Biaya Panggilan		-
4.	Biaya Pemberitahuan		-
5.	Biaya Pemeriksaan setempat		-
6.	Biaya Penerjemah/ sumpah/ Saksi		-
7.	Biaya pengiriman Berkas		-
8.	Biaya materai		Rp. 3.410.000
9.	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan		Rp. 3.410.000
10.	Biaya Proses dan Pemberkasan		Rp. 35.780.000
11.	Biaya lain-lain (ATK)		Rp. 44.750.000
		Rp. 91.693.450	Rp. 87.350.000
	<b>Saldo</b>		Rp. 10.083.450
	<b>Jumlah</b>	Rp. 91.693.450	Rp. 91.693.450

**Laporan Tahunan Keuangan Perkara Tingkat Pertama  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Tahun 2025**

NO	URAIAN	JUMLAH	
		PENERIMAAN	PENGELUARAN
1.	Sisa Awal	Rp. 48.835.980	-
2.	Penerimaan bulan ini	Rp. 100.477.000	-
3.	Biaya Panggilan		Rp. 1.698.660
4.	Biaya Pemberitahuan		Rp. 275.880
5.	Biaya Pemeriksaan setempat		-
6.	Biaya Penerjemah/sumpah/Saksi		-
7.	Biaya pengiriman Berkas		Rp. 9.0360.500
8.	Biaya materai		Rp. 520.000
9.	Biaya Hak-Hak Kepaniteraan		Rp. 12.331.500
10.	Biaya Media Massa		-
11.	Biaya lain-lain (ATK)		Rp. 11.450.000
12.	Pengiriman Biaya Perkara		Rp. 7.165.000
13.	Pengembalian Sisa Panjar		Rp. 22.152.940
		Rp. 149.312.980	Rp. 64.630.980
	Saldo		Rp. 84.682.000
	Jumlah	Rp. 149.312.980	Rp. 149.312.980

**Laporan Realisasi Pendapatan PNBP  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
Tahun 2025**

No	Map	Uraian Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Vol	Tarif (RP)	Jumlah Penerimaan (RP)	Jumlah Disetor (RP)
I	Pendapatan Kejaksaan/Peradilan					
	425323	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan				
		- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung	5		1.750.000	1.750.000
		-				
	JUMLAH I				1.750.000	1.750.000
II	Pendapatan Kejaksaan/Peradilan					
	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan				
		- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	71	1.000	710.000	710.000
	425233	Pendapatan Ongkos Perkara				
		- Pendaftaran Gugatan/Permohonan	24	30.000	720.000	720.000
		- Pendaftaran Permohonan PK dan Penerimaan Alasan PK dari Pemohon	2	200.000	400.000	400.000

		- Pendaftaran Permohonan Kasasi	19	50.000	950.000	950.000
425239		Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya				
		- Surat Pemberitahuan akta kasasi	17	10.000	50.000	50.000
		- Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Isindetil untuk mewakili pihak yang Berperkara di Pengadilan	73	10.000	730.000	730.000
		- Penyempahan Novum (bukti baru) PK	5	10.000	30.000	30.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Tergugat / Termohon	22	10.000	220.000	220.000
		- Surat Penyerahan Memori Kasasi	11	10.000	110.000	110.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Termohon PK	4	10.000	40.000	40.000
		- Surat Panggilan Pertama kepada Penggugat / Pemohon	30	10.000	300.000	300.000
		- Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi	55	10.000	550.000	550.000
		- Redaksi Putusan / Penetapan	342	10.000	3.420.000	3.420.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Pemohon Kasasi	13	10.000	130.000	130.000
		- Penyerahan Turunan / salinan Putusan / Penetapan Pengadilan	3.930	500	1.965.000	1.965.000
		- Sisa Uang Panjar Perkara yang lebih dari 6 bulan tidak diambil oleh pihak ketiga (Sisa Uang Panjar Biaya Perkara yang tidak diambil oleh para pihak lebih dari 6 (enam) bulan)	1	2.817.400	2.817.400	2.817.400
		- Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan kepada Penggugat / Pemohon	2	10.000	20.000	20.000
		- Surat Pemberitahuan Putusan / Penetapan Kepada Termohon Kasasi	9	10.000	90.000	90.000
JUMLAH II					13.422.400	13.422.400
JUMLAH I s/d II					15.172.400	15.172.400

**Panjar Biaya Perkara  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :**

No	Uraian	Jumlah			
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Sisa Awal	1.239.369.037			
2	Penerimaan Tahun Ini		1.728.375.150		
3	Biaya Proses/ATK/ Pemberkasan			168.650.000	
4	Biaya Panggilan			75.567.500	
5	Biaya Pemberitahuan			95.362.000	
6	Biaya Pemeriksaan Setempat			254.030.600	
7	Pengiriman Biaya Perkara			269.310.000	
8	Meterai			7.370.000	
9	PNBP				
	a. Pendaftaran			61.455.000	
	b. Redaksi			14.740.000	
	c. Lainnya			68.012.500	
	d. Sisa Panjar disetor			22.193.700	
10	Pengembalian Sisa Panjar Biaya Perkara			199.630.527	
11	Biaya Lainnya Pengumuman Media				
12	Pemberkasan dan Pengiriman			143.056.250	
	Jumlah	1.239.369.037	1.728.375.150	1.379.378.077	1.588.366.110

**Panjar Biaya Perkara  
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :**

NO	URAIAN	JUMLAH			
		SALDO AWAL	PENERIMAAN	PENGELUARAN	SALDO AKHIR
1	Saldo Awal	156.050.105			
2	Penerimaan		1.039.851.501		
3	Biaya ATK			95.055.000	
4	Biaya Panggilan			22.235.000	
5	Biaya Pemberitahuan			28.075.000	
6	Biaya Pemeriksaan Setempat			537.612.000	

7	Biaya Pengiriman dan Pemberkasan			109.120.000	
8	Materai			5.900.000	
9	PNBP :				
	1) Biaya Pendaftaran			22.770.000	
	2) Redaksi			4.070.000	
	3) PNBP lain-lain			49.814.500	
	4) Pengembalian Sisa Panjar			130.195.001	
	5) Pengumuman media			0	
10	Map			7.695.500	
11	Penggandaan Informasi			5.168.000	
<b>JUMLAH</b>		<b>156.050.105</b>	<b>1.039.851.501</b>	<b>1.017.710.001</b>	<b>178.191.605</b>

## **B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA**

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara sarana prasarana dikelola berdasarkan sistem yang disebut dengan SABMN adalah suatu sistem terpadu yang merupakan gabungan prosedur manual dan komputerisasi dalam rangka menghasilkan data transaksi untuk mendukung penyusunan neraca. disamping itu SIMAK-BMN juga didukung oleh laporan Barang Milik Negara (BMN) dan berbagai Kartu Kontrol yang berguna untuk menunjang fungsi pengelolaan barang milik Negara.

Dalam pelaksanaan akuntansi Barang Milik Negara dibantu dengan perangkat lunak (software) yang memungkinkan penyederhanaan dalam proses manual dan mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaannya. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah pula menerapkan sistem pelaporan aplikasi Barang Milik Negara yang disebut dengan aplikasi SIMAN. aplikasi tersebut terhubung dengan aplikasi SIMAK-BMN yang kini berubah

menjadi SAKTI adapula berbasis website yaitu e-Sadewa yang digunakan untuk dan digunakan untuk pelaporan dan rekonsiliasi.

### **1. Sarana dan Prasarana Gedung**

Pengelolaan Sarana dan prasarana gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta meliputi pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Negara yang terdiri dari Tanah. Gedung Bangunan Kantor Permanen dan Rumah Negara Permanen. pengelolaan sarana dan prasarana gedung ini meliputi :

#### **a. Tanah gedung kantor dan tanah rumah dinas**

- Tanah gedung kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sertifikat No.05 Sertipikat Hak Pakai Nomor 09.01.03.05.4.00024 Tanggal 05 April 1991 dengan luas 1.526 M<sup>2</sup>. Sertifikat ini atas nama Mahkamah Agung RI.
- Sertifikat tanah Rumah Dinas sudah dibalik namakan menjadi atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq Mahkamah Agung RI

#### **b. Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Halaman Gedung**

- Luas Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta 4.195 M<sup>2</sup> yang terdiri 4 lantai.
- Sudah dibuatkan KIB Bangunan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No KIB 1 dengan kode barang 4.01.01.01.001
  
- Selama TA 2025 telah dilakukan pemeliharaan gedung kantor yang dibiayai oleh DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kode MAK. 002.523111 dengan anggaran sebesar Rp 449.997.000,- dan realisasi sebesar Rp. 449.997.000,- Pemeliharaan yang telah dilakukan diantaranya pengecatan gedung kantor, perbaikan ruang lobby dan informasi, Pengecatan lantai drop off lobby, perbaikan instalasi listrik, perbaikan plafond yang rusak,

perbaikan wc/toilet, penggantian engsel pintu, penggantian anak kunci dan handle pintu yang rusak, pengecatan pagar depan, dan samping gedung kantor, pemeliharaan jaringan internet, pemeliharaan taman dan pot bunga, pembelian bunga-bunga, perapihan dan pemeliharaan taman dan pemeliharaan gedung kantor lainnya yang dianggap perlu.

- Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berdiri di atas tanah seluas 1792 m<sup>2</sup>, Sertifikat Hak Pakai No. 57, Sertifikat atas nama Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI, terletak di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung. Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah direhab sebanyak 3 (tiga) kali yakni di Tahun Anggaran 2011, Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2016, sehingga Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah sesuai dengan prototype Gedung Pengadilan Mahkamah Agung RI dan telah diresmikan pada tanggal 31 Januari 2017 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M. Hatta Ali., S.H., M.H.

## **2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung**

Sarana dan Prasarana kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah semua peralatan-peralatan yang diperlukan untuk terselenggaranya kegiatan persidangan dan perkantoran Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta baik yang sifatnya langsung maupun yang sifatnya menunjang sehingga pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat terlaksana dan berjalan dengan efektif dan baik bagi pengguna layanan pengadilan termasuk didalamnya penyandang disabilitas. Adapun pengelolaan sarana dan prasarana Kantor meliputi pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor.

Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset tetap yang mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai. Barang Milik Negara yang termasuk dalam kategori ini adalah koleksi buku perpustakaan.

**a. Pengelolaan Peralatan Inventaris Kantor**

Meliputi :

1. Telah dilakukan Pelabelan peralatan inventaris kantor terutama untuk barang inventaris baru.
2. Pelaporan BMN Semester 1 dan 2 sudah dilakukan tepat waktu.

**b. Perawatan terhadap inventaris kantor dilakukan antara lain:**

- Perawatan AC serta pengisian freon dan penggantian sparepart sesuai kebutuhan.
- Perawatan Komputer dilakukan dengan update antivirus, instal ulang program dan penggantian sparepart computer sesuai kebutuhan.
- Servis printer, PC Unit dan alat pengolah data lainnya.

**Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran**

No	Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran	Jumlah	Keterangan
1.	Server	1 unit	
2.	P.C Unit	68 unit	
3.	Laptop	42 unit	
4.	Printer	30 unit	
5.	AC Split	14 unit	
6.	LCD TV	5 unit	
7.	Genset	1 unit	
8.	Infokus	2 unit	

a) **Fasilitas Ruang :**

❖ **Sarana Persidangan :**

Ruang Sidang sebanyak 3 (tiga) ruangan yakni :

- Ruang Sidang Utama
- Ruang Sidang 1
- Ruang Sidang 2
- Ruang Pemeriksaan Persiapan.

Ruang Tunggu Pengunjung sidang, Meja Informasi/Meja Pengaduan, Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan (lobby).

❖ **Ruang Kerja Pegawai :**

- Ruang Ketua,
- Ruang Wakil Ketua
- Ruang Para Hakim Tinggi
- Ruang Panitera
- Ruang Sekretaris
- Ruang Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran
- Ruang Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
- Ruang Ka.Bag. Perencanaan dan Kepegawaian
- Ruang Ka.Bag. Umum dan Keuangan, Ruang Sub. Bag. Keuangan dan Pelaporan
- Ruang Ka. Sub Bag. Tata Usaha dan Rumah Tangga
- Ruang Pan. Muda Perkara
- Ruang Pan. Muda Hukum
- Ruang Panitera Pengganti.

❖ **Ruang Lainnya :**

- Ruang Arsip Perkara Inkrachth
- Ruang Arsip Perkara Aktif
- Ruang Perpustakaan
- Musholla
- Ruang Panel pompa air

- Ruang panel Listrik
- Ruang server
- Ruang Panel lantai 2, 3 dan 4
- toilet Pria dan toilet wanita
- Ruang Gudang.

**b) Fasilitas Pendukung Lainnya :**

- ❖ Tempat Parkir kendaraan roda empat dan roda dua.
- ❖ Hot spot internet/wifi
- ❖ Monitor jadwal sidang dan monitor roll perkara banding.
- ❖ Kendaraan Dinas /Operasional :

**❖ Sarana dan Prasarana Tanah, Gedung pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**

Pengadilan Tata Usaha negara Serang menempati tanah dan bangunan sendiri dimana status kepemilikan sudah atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung RI. Dengan Luas Tanah 4.242 m<sup>2</sup>, Luas Bangunan 1.572 m<sup>2</sup>.

Kondisi saat ini prasarana tanah dan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan luasan 555 m<sup>2</sup> terkena dampak pelebaran jalan program pembangunan Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2016, namun karena lahan pengganti belum tersedia pelebaran jalan di depan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum dilaksanakan. Hingga tahun 2025 penggantian lahan yang telah disepakati masih dalam proses negosiasi harga antar pemilik tanah dengan Pemerintah Provinsi Banten.

**Daftar Kendaraan Dinas Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Sewilayah Satuan Kerja adalah sebagai berikut :**

No	Nama Satker	Kendaraan Roda 4 (KR4)			Kendaraan Roda Dua (KR 2)			Ket
		Baik	Ringan	Rusak Berat	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Pengadilan Tinggi TUN Jakarta	5		1	5		2	
2.	Pengadilan TUN Jakarta	-	2	2		7	1	
3.	Pengadilan TUN Bandung	4			6			
4.	Pengadilan TUN Serang	3		1	2	-	1	

**d) Penghapusan**

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, untuk itu kegiatan penghapusan sebagai salah satu alur pengelolaan Barang Milik Negara yang harus diperhatikan, dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 83/PMK.06/2016 tentang tata cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara.

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan Penerbitan Keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dari fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

**e) Dinas :**

Daftar Rumah Dinas Pengadilan Tinggi TUN Jakarta dan Sewilayah Satuan Kerja adalah sebagai berikut :

**❖ Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Rumah Dinas yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berjumlah 2 (dua) unit yang berada di Jalan Sunter Mas Blok A No. 40 dan 41, Sunter Jakarta Utara, yang

1 (satu) unit rumah dinas tersebut sudah rusak berat dan tidak layak untuk dihuni.

❖ **Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta :**

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	Rumah Dinas	1993				
1.1	Ketua	1993			v	
1.2	Wakil	1993			v	
1.3	Hakim	1993			v	
1.4	Hakim	1993			v	
1.5	Hakim	1992		v		
1.6	Hakim	1992		v		

❖ **Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :**

Rumah Dinas/Rumah Negara/Rumah Jabatan untuk Hakim PTUN Bandung tersedia sebanyak 8 (delapan) unit dengan lokasi di 3 (tiga) tempat yakni:

1. Rumah Dinas Hakim sebanyak 3 (tiga) unit, beralamat di Jalan Cipagalo Girang No. 04 A, B, C RT/RW 01/06 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung, berdiri di atas tanah atas nama Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI, Sertifikat Hak Pakai No. 4, Kelurahan Margasari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung.
2. Rumah Dinas Hakim sebanyak 2 (dua) unit, beralamat di Jalan Jupiter Selatan IV, berdiri di atas tanah atas nama Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI, Sertifikat Hak Pakai No. 5, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung.
3. Rumah Dinas Hakim sebanyak 3 (tiga) unit, beralamat di Jalan Rancabolang Barat, berdiri di atas tanah atas nama Pemerintah RI Cq. Mahkamah Agung RI, Sertifikat Hak Pakai No. 8, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung.

### **C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI**

#### **- Implementasi e-court di Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta.**

E-court sendiri adalah layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk pendaftaran perkara secara on line, untuk mendapatkan taksiran Panjar Biaya Perkara secara on line, pembayaran on line, serta pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan dilakukan secara elektronik.

Dalam E-court ini ada payung hukum sebagai landasan untuk pelaksanaan kegiatan ini yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara elektronik.

Terdapat 4 (empat) jenis layanan secara elektronik yaitu :

1. E-filing yaitu pendaftaran perkara online di pengadilan
2. E-payment yaitu pembayaran Panjar biaya perkara secara online
3. E-summons yaitu pemanggilan pihak secara online
4. E-litigations yaitu proses persidangan secara online.

Sesuai dengan kebijakan dari Mahkamah Agung yang menerapkan transparansi peradilan yang berbasis teknologi informasi, Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada Tahun 2025 ini menerima Permohonan Banding secara elektronik yang kita kenal sebagai e-Court, disamping tetap menerima permohonan banding secara konvensional. Permohonan banding secara e-Court mulai masuk pada tanggal 7 April 2021 sampai dengan Desember 2023 terdapat 302 perkara banding yang masuk dimana 138 perkara banding dilakukan melalui e-Court.

Bentuk layanan e-court pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat 3 layanan yaitu :

- a. Pendaftaran perkara secara elektronik

Pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan melalui aplikasi e-court.



Bentuk layanan e-court pada Pengadilan Tata Usaha Negara terdapat 3 layanan yaitu :

a. Pendaftaran perkara secara elektronik

Pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan melalui aplikasi e-court.

b. Pembayaran secara elektronik

Pengguna pendaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang degenerate secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate terseutsudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan dan besaran biaya radius yang juga telah ditetapkan oleh ketua pengadilan, sehingga perhitungan tafsiran biaya panjar telah diperhitugkan sedemikian rupa dan menghasilkan SKUM elektronik ata e-SKUM.

c. Pemanggilan secara elektronik

Pemaggilan kepada Penggugat yang mendaftarkan gugatannya melauai e-court dilakukansecara elektronik yang dikirimkan ke domisili elektronik Penggugat. Bagi pihak Tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manualdan pada saat Tergugat hadir pada persidangan pertama akan dimintai persetujuan apakah setuju dengan beracara secara elektronik atau tidak,jika setuju maka pihak Tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan.

d. Persidangan secaa elektronik (e-litigasi)

Aplikasi e-court juga digunakan untuk tukar menukar dokumen persidangan seperti Gugatan, Jawaban, Replik,

Duplik dan Kesimpulan secara elektronik yang dapat diakses oleh aparaturnya pengadilan tata usaha negara dan para pihak berperkara. Dengan adanya e-litigasi, para pihak dalam persidangan tahapab menjawab dan kesimpulan tidak perlu datan ke pengadilan tata usaha negara.

Sementara ini untuk Aplikasi E-court yang berada di Lingkungan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah sebagai berikut :

### **1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023, PTUN Jakarta telah menerima 671 (Enam Ratus Tujuh Puluh Satu ) perkara gugatan dan 7 (Tujuh) perkara permohonan Perlawanan secara *e-Court*, baik perorangan (pengguna lain) maupun melalui kuasa hukum/advokat (pengguna terdaftar) Lahirnya aplikasi *e-court* dan *e-litigasi* serta upaya hukum banding elektronik merupakan bentuk respon Mahkamah Agung untuk menghadirkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (*Justice reform*) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*).

### **2. Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung**

Di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sendiri penerapan e-court diterima dengan baik karena membawa keuntungan dalam proses berperkara. Awal pencanaan e-court masih banyak yang belum memahami apa itu e-court tapi pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sebagai pihak yang menyelenggarakan proses perkara tersebut berusaha memberikan informasi tentang e-court kepada khalayak luas terutama pihak pejabat pemerintahan agar dengan senang hati

menerima e-court sebagai satu-satunya tempat yang lebih baik untuk beracara.

E-court yang disebarluaskan itu membawa hasil dengan sedikit demi sedikit masyarakat mamahami arti e-court dan mulai menggunakan e-court sebagai wadah untuk beracara di pengadilan. Penyebarluasan informasi tentang e-court dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat, kepada para advokat dan pemerintah daerah. Memuat e-court di website Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar lebih mudah masyarakat memngetahui tentang e-court. Membuat spanduk dan brosur-brosur tentang e-court dan disebarluaskan dengan memberikan kepada masyarakat. Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang beracara menggunakan e-court itu sudah ada 247 perkara.

Dari hasil implementasi e-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dapat dilihat untuk tahun 2024 dan 2025 telah ada 247 perkara e-Court. Memamng tidak mudah bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menyebarkan informasi tentang e-Court dikarenakan adanya kendala luasnya daerah yang berada dibawah Pengadilan Tata Usaha Negara bandung tapi tidak menutup kemungkinan untuk dapat berkembang karena kemajuan teknologi.

### **3. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**

Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang E-Court merupakan instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat, secara garis besar proses e-Court dimulai pendaftaran perkara secara online (*e-filling*), pembayaran panjar perkara elektronik (*e-payment*), pengiriman dokumen secara online, pemanggilan secara online (*e-summons*), persidangan secara elektronik (*e-litigation*) dan penyampaian putusan secara online.



yang  
negara

2025	109	Putus 38 Dismissal 7 Cabut 54 Perlawanan 1	9
------	-----	---	---

**- Implementasi SIPP di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

SIPP adalah singkatan dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara, bahwa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga peradilan tingkat banding dalam hal untuk menunjang dalam memberikan pelayanan hukum yaitu untuk kelancaran administrasi Kepaniteraan dan Sekretariat, pemanfaatan Teknologi Informasi menjadi hal yang sangat penting di zaman era keterbukaan informasi menjadi mutlak adanya sarana/prasarana bagi pencari informasi agar informasi yang didapat menjadi semakin mudah, murah dan cepat.

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 sebagai referensi tentang keterbukaan Informasi di pengadilan. Dalam penegakan hukum berperan membantu masyarakat umum agar mudah memperoleh informasi (dari mulai proses beracara sampai dengan pemberitahuan putusan), bahkan bagi internal aparat Peradilan Tata Usaha Negara sendiri dapat mempermudah untuk mengakses informasi dari segi administrasi sampai dengan internal rule seperti : Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung, Keputusan atau aturan Kebijakan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung RI dan secara khusus dapat membantu penerapan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Perkembangan teknologi informasi saat ini semakin modern dan berkembang pesat oleh karenanya harus diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya dalam mengolah informasi. Melihat pentingnya penerapan informasi ke public, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menerapkan informasi yang salah satunya melalui portal/website. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah memiliki website resmi dengan alamat website <http://pttun-jakarta.go.id>.

Berikut ini beberapa sarana Teknologi Informasi yang telah dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu :

a. Perangkat Keras

- PC server (IBAM), PC Client
- Mikrotik RB 1100
- TV LED
- Wifi cisco, wifi TP Link
- Router sebanyak 4 (empat) buah
- Wireless Access Point sebanyak 2 (dua) buah
- Rak server sebanyak 1 (satu) buah
- TV LCD sebanyak 1 (satu) buah

b. Perangkat Lunak

- Aplikasi TNDE

- Website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta (<http://www.pttun-jakarta.go.id>).
- Alamat SIPP Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta adalah
- Publikasi Perkara (one day publish)

Untuk meningkatkan pelayanan publik dan memuaskan pelayanan masyarakat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengedepankan beberapa program unggulan salah satunya one day publish yaitu merupakan layanan kepada pencari keadilan untuk mendapatkan informasi putusan dalam satu hari. Pelayanan program ini telah berjalan sesuai harapan.

#### ❖ **Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta**

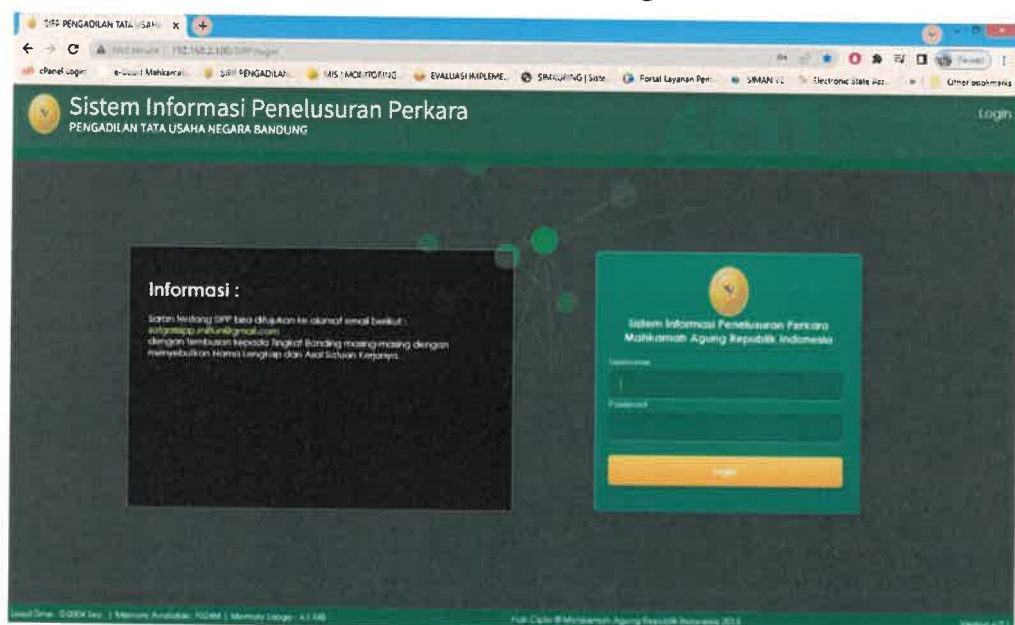
Pelaksanaan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang Pelaksanaan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkembangan instalasi dan penggunaan SIPP sekarang sudah dikembangkan versinya menjadi 5.6.4 sehingga aplikasi SIPP bisa terintegrasi dengan aplikasi direktori putusan, E-Court, dan memudahkan penginputan data putusan yang diinput di SIPP bisa langsung masuk ke dalam aplikasi direktori Mahkamah Agung, walaupun ada beberapa kendala dalam aplikasi SIPP seperti Perkara Perlawanan terhadap Penetapan dismissal, Perkara Gugatan Keterbukaan Informasi, dengan perkembangan tersebut pimpinan di pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding maupun Mahkamah Agung dapat memonitoring kinerja Hakim dan Panitera/ Panitera Pengganti, dan Jurusita Pengganti serta staf kepaniteraan perkara dalam penginputan data perkara ke dalam

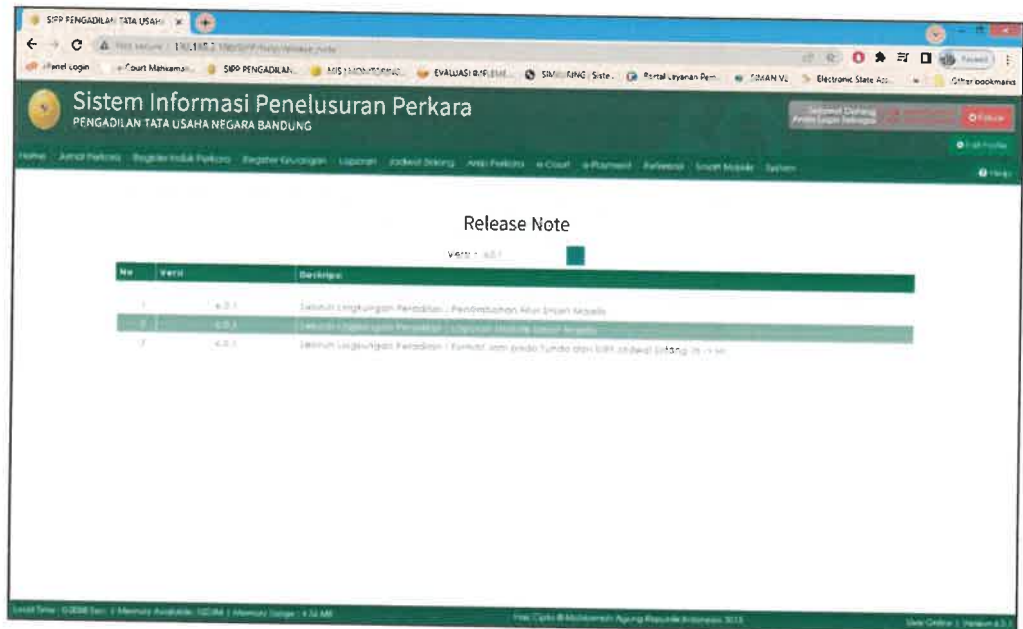
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

❖ **Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Bandung**

Untuk meningkatkan kelancaran dalam proses berperkara dan untuk mempermudah pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan maka Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menggunakan system SIPP (System Informasi Penelusuran Perkara), yang mana system ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI dalam bentuk aplikasi yang harus diketahui oleh para pengguna yaitu dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Wakil Ketua, para hakim, panitera, para panitera pengganti, jurusita pengganti dan bagian kepaniteraan muda baik perkara maupun hukum. Untuk para pencari keadilan sendiri hanya dapat melihat jadwal sidang serta majelis hakim serta panitera pengganti dan juga sudah sampai tahap mana sidang itu berlangsung. Aplikasi SIPP telah menjadi bagian dari proses penanganan perkara. Aplikasi SIPP di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung selalu menyesuaikan dengan versi yang terbaru.

Saat ini aplikasi SIPP menggunakan versi 5.6.4 dengan perbaikan dan penambahan menu sebagai berikut :





#### ❖ Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Serang

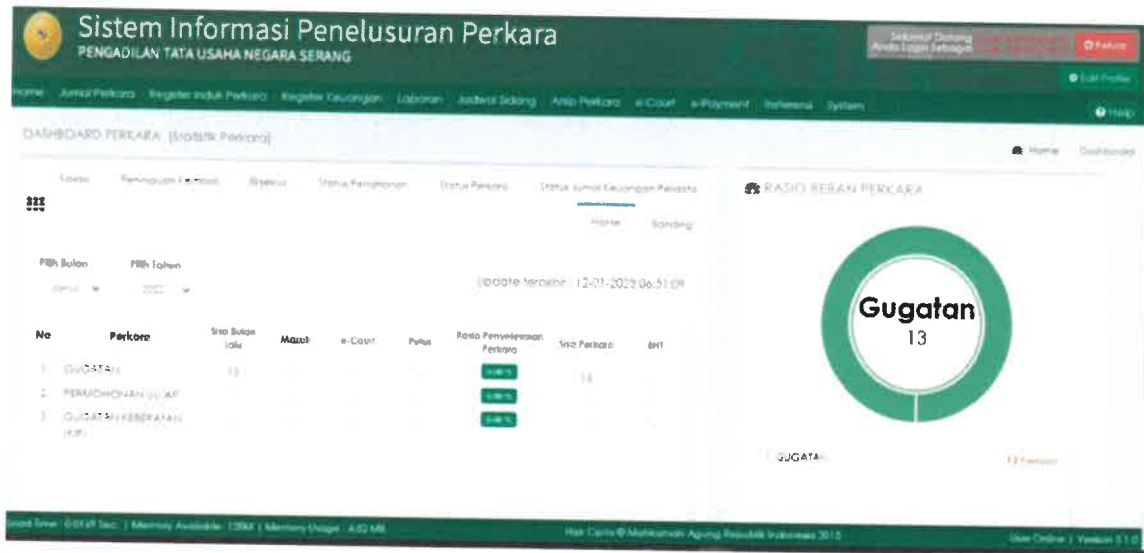
Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) merupakan wujud integrasi teknologi informasi dengan ragam regulasi di bidang administrasi perkara. Sampai dengan akhir tahun 2025 aplikasi SIPP yang digunakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang menggunakan SIPP Versi 5.6.4.

Aplikasi SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang terkoneksi dengan SIPP Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sehingga informasi perkara dapat diakses para pihak pencari keadilan cukup melalui SIPP baik itu proses pada tingkat pertama maupun banding. Disamping itu, putusan yang diupload ke SIPP secara otomatis juga terupload ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Secara rutin database SIPP Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dilakukan sinkronisasi, baik ke tingkat banding maupun ke Mahkamah Agung RI. Alamat SIPP Web pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang adalah sebagai berikut:

## Alamat SIPP Web Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Satker	Alamat SIPP
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang	<a href="http://192.168.51.2/SIPP32">http://192.168.51.2/SIPP32</a>



Antar Muka Aplikasi SIPP PTUN Serang



Antar Muka Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP PTUN Serang.

## **B A B V**

### **PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK**

#### **A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU**

Akreditasi Penjaminan Mutu adalah untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima (indonesian Court Performance Excellent-ICPE). Akreditasi penjaminan mutu merupakan suatu bentuk komitmen Mahkamah Agung dalam memberikan pelayanan informasi kepada pencari keadilan. Program ini sudah berjalan sejak tahun 2015.

Pada tahun 2015 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mendapatkan Sertifikasi ISO Pengadilan yang mana pelaksanaan perpanjangan sertifikasi Sistem Manajemen ISO 9001-2009 untuk ruang lingkup Penyelenggaraan dan Pelayanan Hukum Lainnya di Pengadilan dari Lembaga Sertifikasi TUV NORD Indonesia dengan ketentuan sebagai berikut :

Register Sertifikat : 16.00 A 16001  
No. Audit Report : 1-A 16001/2016  
Diterima : 06 Januari 2016  
Berlaku sampai : 22 September 2016  
Masa Berlaku Asli : 5 Januari 2020.

1. Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah.

Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mendapatkan Serifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dengan terakreditasi nilai excellent dikeluarkan pada tanggal 06 September 2018 Nomor : TAPM.14-TUN/QMR/SERTIFIKAT/9/2018, yang ditanda tangani oleh Dr. Mulyono, SH.SIP.MH. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I.

Pada tahun 2020 ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan publik, maka pada tanggal 1 Februari 2020 dengan Piagam Pencanangannya Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan melayani dengan diikuti adanya Maklumat Pelayanan yang ditanda tangani Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan kesanggupannya menyelenggarakan pelayanan peradilan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan apabila tidak bisa menepati/memenuhi standar pelayanan tersebut, siap menerima sanksi sesuai Peraturan yang berlaku, yang pada akhirnya mendapatkan penilaian dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan telah mendapatkan sertifikat pada tanggal 10 Desember 2020, sebagai Unit Kerja Pelayanan Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (**WBK**).

Pada hakekatnya adanya Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good governance). Adanya Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Adapun dilingkungan satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk meningkatkan pelayanan masyarakat pencari keadilan telah mendapatkan nilai Akreditasi diantaranya :

1. Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan TUN Jakarta,

Telah dilaksanakan ulang Hasil Penilaian Akreditasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dilaksanakan di ruang sidang Kartika dan dibuka langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Bapak Dr. H. Hari Sugiharto, SH., MH Panitera PTUN Jakarta, Bapak Didik Hari Wasito, SH., MH, Sekretaris PTUN Jakarta, Bapak Ono Haryono, SE, Seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional beserta Seluruh Staf PTUN Jakarta. Hadir sebagai Ketua Tim Assesor, Ibu Hj. Lulik Tri

Cahaya Ningrum, SH., MH beserta Rombongan (Tim Assesor PERATUN Dirjen Badil miltun Mahkamah Agung RI). Dalam kegiatan akreditasi ini terdapat 7 (tujuh) area yang akan dievaluasi, yaitu : Manajemen kepemimpinan dan sumber daya manusia, Pola bindalmin dan SOP penyelesaian perkara, Sarana dan prasarana pengadilan, E Judiciary, Layanan Pengadilan, PNPB dan Survei Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Penilaian tersebut dilakukan selama 2 (dua) Hari Kerja dari tanggal 02 Juli s/d 03 tahun 2019, dengan Hasil Penilaian A (Excellent).



2. Pengadilan TUN Bandung, Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dilaksanakan sebanyak 2 kali, yang pertama dilaksanakan pada tahun 2017 yang dimulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2017; Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung memperoleh sertifikasi Penjaminan Mutu dari TAPM (Tim Akreditasi Penjaminan Mutu) Mahkamah Agung RI dengan predikat baik (B), dengan perincian sebagai berikut :

Nomor Sertifikasi :TAPM.01-TUN/QMR/SERTIFIKAT/10/2017

Tanggal :27 Oktober 2017

Akreditasi Penjaminan Mutu untuk kedua kalinya diadakan bulan 12 – 13 September 2019, dengan memperoleh Sertifikasi Penjaminan Mutu dari TAPM (Tim Akreditasi Penjaminan Mutu) Mahkamah Agung RI dengan memperoleh nilai A (92,23), dengan keterangan sebagai berikut :

Nomor Sertifikasi :TAPM. 19-TUN/QMR/SERTIFIKAT/9/2019

Tanggal :26 September 2019



### 3. Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Program Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang diterapkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang merupakan pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan. Program akreditasi mendorong optimalisasi sarana, prasarana dan sistem manajemen untuk mewujudkan performa, kinerja dan pelayanan publik yang prima.

Pengadilan sebagai benteng terakhir penegak hukum harus terus menerus memperbaiki sistem Pengadilan guna meningkatkan kepercayaan publik, salah satu wujud dari Badan Peradilan yang Agung adalah Pengadilan yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini terus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan.

Dasar pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu adalah Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor: 1142/DJMT.3/B/9/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pelaksanaan Akreditasi Tahun Anggaran 2017.

Akreditasi penjaminan mutu yang berprinsip inovatif, terstruktur, sistematis dan berkelanjutan telah dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tahun 2020 dan memperoleh hasil penilaian A (Excellent) hasil tersebut mengulangi/mempertahankan penilaian yang telah diperoleh sebelumnya pada tahun 2018, dengan kriteria penilaian yang digunakan meliputi 7 (tujuh) area yaitu: 1) Manajemen Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia, 2) Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara, 3) Sarana dan Prasarana Pengadilan, 4) E-Judicary, 5) Layanan Pengadilan, 6) PNBP dan Biaya Proses Penyelesaian Perkara, 7) Survei Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat.

Program akreditasi penjaminan mutu di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang telah berjalan dan banyak diraih oleh satuan kerja secara substansi memiliki kesamaan maksud, tujuan, data dan sumber data dengan program reformasi birokrasi yang diimplementasikan dalam pembangunan zona integritas maka perlu dilakukan integrasi dari kedua program tersebut untuk mengefisienkan pengelolaan dan memudahkan satuan kerja di daerah untuk tidak perlu berkali-kali menyediakan data yang pada hakekatnya sama tetapi dipergunakan untuk tujuan yang berbeda-beda.

Seiring berjalannya program zona integritas menuju WBK-WBBM Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dalam menatalaksanakan program akreditasi penjaminan mutu yang telah ada, maka tahun 2025 tetap melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur dan Risk Register yang telah disusun oleh Satker, hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan. Monev juga dapat membantu mengidentifikasi masalah yang muncul sehingga dapat segera ditangani.

## **B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah dan transparan, terukur, terjangkau serta terwujudnya pelayanan yang prima, akuntabel, anti KKN, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melakukan perubahan system pelayanan secara terstruktur dan terintegrasi dalam satu kesatuan sesuai dengan arahan dan instruksi dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. Nomor : 462:DJMT/KEP/8/2018 tanggal 08 Agustus 2018.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian biaya panjar perkara hingga penyerahan/pengembalian produk pengadilan melalui satu pintu.

Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta telah menerapkan System Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sejak bulan Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2.TUN/995/PS.01.7/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Penunjukan Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan terakhir

diperbarui dengan Nomor : W2-TUN/708/PS.01/5/2020 tanggal 9 Mei 2020.

Berikut beberapa lampiran PTSP di wilayah satuan kerja Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta :



◆ **Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**

Pelayanan Publik di setiap instansi terus ditingkatkan dan dipermudah, saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang senantiasa berupaya menata, meningkatkan, dan menyederhanakan pelayanan publik dengan cara menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui PTSP ini Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah memberikan pelayanan prima dalam hal pelayanan publik yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap awal permohonan sampai

akhir/diterbitkannya sebuah dokumen dilakukan di dalam satu tempat.



PTSP tersebut dilakukan dengan memberikan pelayanan yang terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. Penyelenggaraan PTSP ini senantiasa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip dasar berupa keterpaduan, efektif, efisien, ekonomis, koordinatif, akuntabilitas, dan aksesibilitas. Ruang lingkup PTSP di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang ini meliputi seluruh pelayanan administrasi yang menjadi lingkup kompetensi/kewenangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Peraturan Perundangan lainnya yang berlaku.



Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Serang telah mengembangkan PTSP secara online, untuk lebih memudahkan para pencari keadilan yang memerlukan informasi dapat terlayani tanpa harus mendatangi kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang. Hal tersebut dirasa lebih efektif dan efisien.



PTSP secara online yang dapat diakses oleh para pencari keadilan adalah sebagai berikut:

- Layanan informasi melalui sambungan telepon/*voice call* (0254) 214085

#### LAYANAN PTSP ONLINE



##### **Voice Call**

Layanan Informasi Melalui Telepon.

(0254) 214085

Gambar 5.5. Layanan Voice Call PTSP Online

- Layanan informasi melalui *video call* melalui Zoom.



Gambar 5.6. Layanan Video Call PTSP Online

- Layanan Informasi melalui Online Chat



Gambar 5.7. Layanan Online Chat PTSP Online

### C. Inovasi Pelayanan Publik

#### ➤ **Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta**

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah diaplikasikan Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE), inovasi ini sangat membantu sekali untuk mempercepat penanganan berkas-berkas perkara atau surat-surat yang penting yang masuk dari instansi-instansi terkait.

Selama Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menerima Surat sebanyak 1.651 untuk surat masuk dan 1.351 untuk surat keluar.

Indoput (Informasi Dowload Putusan), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta merupakan pengadilan tingkat banding terhadap perkara tata usaha Negara Jakarta, Serang dan

Bandung, serta sekaligus merupakan pengadilan tingkat pertama yang menangani, memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha Negara berdasarkan Pasal 47 (Tentang Banding Administrasi) UU Nomor 5 tahun 1996 jo. UU Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan memiliki kewenangan yaitu sebagai peradilan tingkat banding dan peradilan tingkat pertama, pada praktiknya selama ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama belum mempunyai SIPP dan e-court sehingga belum ada wadah untuk mengupload putusan terutama putusan yang tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut. INDOPUT merupakan inovasi untuk memudahkan masyarakat menemukan dan mendownload putusan-putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan lebih cepat. INDOPUT merupakan bagian dari website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memuat baik putusan gugatan maupun putusan banding.

Diharapkan pada pengujung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dapat lebih mudah dalam mengakses putusan yang merupakan produk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa harus masuk dan mencari Direktorat Putusan Mahkamah Agung RI. Sehingga penyertaan informasi kepada publik dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efisien.

Pedang Pak Rano adalah inovasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Konsep Layanan kepada Masyarakat Pencari keadilan pada layanan sidang dan pengelolaan keuangan perkara.

Pedang Pak Rano adalah aplikasi online yang diakses masyarakat pada : <https://pedangpakrano.pttun-jakarta.go.id>. Data perkara, data pihak, data persidangan, Data keuangan (biaya panjar) dst diperoleh dari sinkronisasi SIPP PTTUN sebagai Tingkat Pertama yang akan secara otomatis secara berkala akan melakukan sinkronisasi dari SIPP PTTUN di localhost ke Lokasi Server Hosting PTTUN Jakarta, sehingga tidak ada proses input ulang

data perkara, data pihak, data biaya panjar oleh pegawai pada aplikasi Pedang Pak Rano melainkan Data cukup diinput pada Aplikasi SIPP PTTUN sebagai tingkat pertama.

Pedang Pak Rano bukan hanya aplikasi Online melainkan aplikasi yang terintegrasi dengan Notifikasi Whatsapp sehingga akan memberikan peringatan persidangan secara otomatis berdasarkan data, server akan mengirim notifikasi mengingatkan bahwa pihak akan ada persidangan pada hari tanggal dan agenda sesuai jadwal persidangan yang diinput pada SIPP.

Layanan Pedang Pak Rano :

1. Layanan Jadwal Sidang
2. Layanan Konfirmasi kehadiran pihak pada persidangan H-1
3. Layanan konfirmasi kehadiran pada hari H
4. Informasi biaya panjar yang mencakup kelebihan panjar dan kekurangan panjar
5. Notifikasi Whatsapp pengingat persidangan H-1 untuk dan himbauan melakukan konfirmasi kehadiran pada persidangan baik pihak P ataupun T
6. Akses informasi perkara melalui whatsapp untuk jadwal sidang, biaya perkara dan informasi perkara.



**PEDANG PAK RANO**

Halo, Administrator  
Super Admin  
admin@pedang-pak-rano.go.id

### Pihak Berperaka Pedang Pak Rano

Pengaturan PIN Pengguna Para Pihak Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

Show 10 - entres Search:

No	Nomor Perkara / Tgl. Pendaftaran	Para Pihak	PIN	Action
1	482/G/2023/PT.PTUN.JKT Jurnal, 22 September 2023	Pengggugat: PT DNAMIKA AGRABANJUN dalam hal ini diwakili oleh Drs. CIPTO SUSTIO Tergugat: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cq. Dejen Administrasi Hukum dan Urutum	372897 085647798758	<a href="#">Kirim Pin</a>
2	482/G/11/2023/PT.PTUN.JKT Jurnal, 22 September 2023	Pengggugat: PT Kartika Artha Sentosa Tergugat: Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral RI	881246 082237288282	<a href="#">Kirim Pin</a>
3	481/G/11/2023/PTUN.JKT Jurnal, 22 September 2023	Pengggugat: I. Adnan B. Mokodompit Tergugat: Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	501871 0856447798758	<a href="#">Kirim Pin</a>
4	481/G/11/2023/PTUN.JKT Jurnal, 22 September 2023	Pengggugat: PT ELLI SHARIPMA UTAMA Tergugat: Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Penggugat:	798763 929894	<a href="#">Kirim Pin</a>

[Generate PIN](#)

**PEDANG PAK RANO**

Halo, Administrator  
Super Admin  
admin@pedang-pak-rano.go.id

### Daftar PIN Para Pihak Pedang Pak Rano

Daftar PIN Pengguna Para Pihak Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

Show 10 - entres Search:

No	Nomor Perkara	Nama	PIN No Whatsapp	Action
1	482/G/2023/PT.PTUN.JKT	PT DNAMIKA AGRABANJUN dalam hal ini diwakili oleh Drs. CIPTO SUSTIO	372897 085647798758	<a href="#">Kirim Pin</a>
2	482/G/11/2023/PT.PTUN.JKT	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cq. Dejen Administrasi Hukum dan Urutum	881246 082237288282	<a href="#">Kirim Pin</a>
3	482/G/11/2023/PTUN.JKT	PT Kartika Artha Sentosa	501871 0856447798758	<a href="#">Kirim Pin</a>
4	482/G/11/2023/PTUN.JKT	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral RI	927773	<a href="#">Kirim Pin</a>
5	481/G/11/2023/PTUN.JKT	I. Adnan B. Mokodompit	798763	<a href="#">Kirim Pin</a>
6	481/G/11/2023/PTUN.JKT	Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	929894	<a href="#">Kirim Pin</a>

Showing 1 to 6 of 6 entres

[Previous](#) [1](#) [Next](#)

**PEDANG PAK RANO**

Halo, Administrator  
Super Admin  
admin@pedang-pak-rano.go.id

### Daftar PIN Para Pihak Pedang Pak Rano

Daftar PIN Pengguna Para Pihak Pengadilan Tinggi TUN Jakarta

Show 10 - entres Search:

No	Nomor Perkara	Nama	PIN No Whatsapp	Action
1	482/G/2023/PT.PTUN.JKT	PT DNAMIKA AGRABANJUN dalam hal ini diwakili oleh Drs. CIPTO SUSTIO	372897 085647798758	<a href="#">Kirim Pin</a>
2	482/G/11/2023/PT.PTUN.JKT	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Cq. Dejen Administrasi Hukum dan Urutum	881246 082237288282	<a href="#">Kirim Pin</a>
3	482/G/11/2023/PTUN.JKT	PT Kartika Artha Sentosa	501871 0856447798758	<a href="#">Kirim Pin</a>
4	482/G/11/2023/PTUN.JKT	Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral RI	927773	<a href="#">Kirim Pin</a>
5	481/G/11/2023/PTUN.JKT	I. Adnan B. Mokodompit	798763	<a href="#">Kirim Pin</a>
6	481/G/11/2023/PTUN.JKT	Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	929894	<a href="#">Kirim Pin</a>

Showing 1 to 6 of 6 entres

[Previous](#) [1](#) [Next](#)

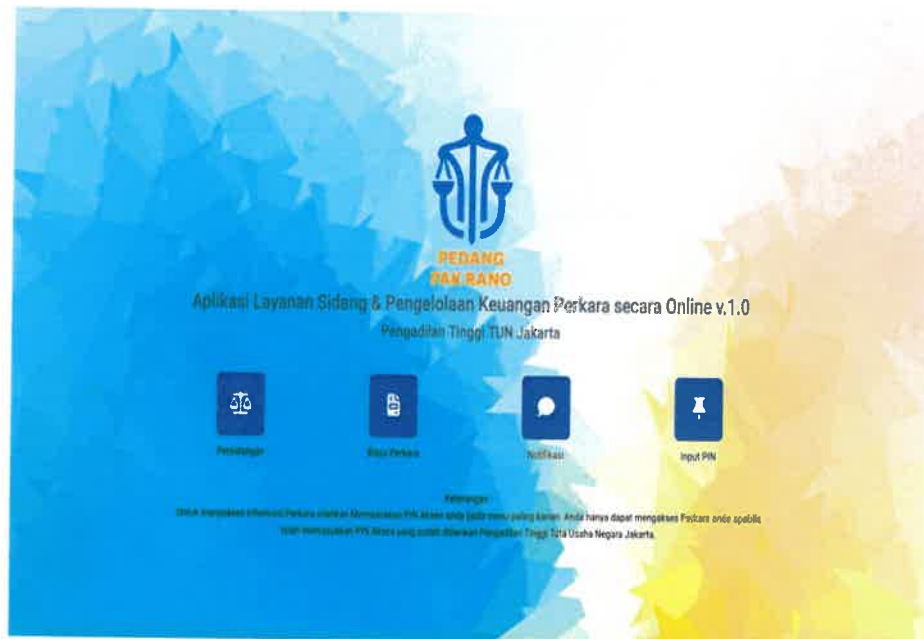
pedangpakrano.pttun-jakarta.go.id  
https://pedangpakrano.pttun-jakarta.go.id  
pedangpakrano.pttun-jakarta.go.id

Kepada Yth. **Carlos Lisbon Sirait, S.Pi., M.M** Akses PIN anda adalah **377382**. Gunakan PIN tersebut untuk mengakses <https://pedangpakrano.pttun-jakarta.go.id>. Seterusnya anda akan mendapatkan notifikasi persidangan H-1 dan anda wajib mengisi konfirmasi kehadiran persidangan melalui aplikasi alamat aplikasi tersebut.

Anda juga dapat mengakses Informasi Perkara, Informasi Persidangan, Informasi Biaya Panjar melalui nomor whatsapp ini. Ketik **info** untuk mendapatkan panduan akses informasi melalui whatsapp.

-----  
**Pedang Pak Rano**  
**PTTUN Jakarta**

05:55 ✓✓



➤ **Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung**

Di tahun 2025 ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah melaunchingkan 9 (Sembilan) inovasi. Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Nomor : 178/KPTUN.W2-TUN2/HK1.2.5/I/2024 Tanggal 23 Januari 2024 tentang Susunan Tim Kerja Inovasi Pelayanan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. 9 (sembilan) inovasi pelayanan ini dibuat untuk memberikan pelayanan bagi

masyarakat pencari keadilan agar puas terhadap pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat.

9 (sembilan) jenis inovasi pelayanan yang dimaksud ini adalah sebagai berikut :

1. Aplikasi Informasi dengan Digital Asistant (Sicecep)

Aplikasi ini menggunakan media WhatsApp Bisnis dasar system kerjanya. Aplikasi ini membantu para pihak pencari keadilan untuk mendapatkan informasi terkait Info Perkara, Info Panjar Biaya Perkara dan persidangan. Bahkan lebih jauh aplikasi ini dapat pula dimanfaatkan public atau masyarakat luas untuk mengetahui kapan suatu perkara akan disidangkan atau sampai dimana proses persidangan suatu perkara.

2. Aplikasi Komunikasi Data Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung (Komdatun Bandung)

Aplikasi ini menggunakan media jaringan Local Area Network (LAN) Server PTUN Bandung dengan Operation System Linux Centos sebagai dasar system kerjanya. Aplikasi ini membantu Aparatur Sipil Negara PTUN Bandung untuk mendapatkan data yang diperlukan dari berbagai ruangan/bagian lainnya.

3. E-Book Plus Pedoman Kerja PTUN Bandung

Aplikasi ini menggunakan Portable Document Format (PDF) sebagai dasar system kerjanya dan terintegrasi dengan Website PTUN Bandung. Aplikasi ini membantu masyarakat termasuk Aparatur Sipil Negara pada PTUN Bandung untuk mengetahui system kerja, tugas pembagian sesuai dengan SOP yang berlaku.

4. Aplikasi PTSP Persuratan

Aplikasi ini menggunakan Web Based Sistem sebagai dasar system kerjanya. Aplikasi ini bertujuan untuk memproses surat masuk dan surat keluar Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

5. Aplikasi E-Touch Information Center

Aplikasi ini menggunakan media macromedia dream weaver yang berguna untuk menyampaikan seluruh informasi yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

6. Aplikasi SIMKURING (Sistem Monitoring Kinerja Persidangan)

Aplikasi ini merupakan Sistem Monitoring Pengukuran Kinerja Persidangan internal yang dimaksudkan untuk memonitoring tingkat kepatuhan pengisian SIPP oleh para Hakim, Panitera Pengganti dan Jurusita pada SIPP sebelum data dikirimkan ke aplikasi MIS Mahkamah Agung, sehingga dapat segera ditindaklanjuti dengan menggunakan sistem peringatan dikirimkan melalui aplikasi SICECEP. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya preventif dual layer yang dilakukan oleh pengadilan sehingga proses minutasasi perkara bisa dipastikan tercapai 100% tepat waktu.

7. PPID Online

Aplikasi ini merupakan sarana permohonan informasi yang dilakukan secara online dan tidak dipungut biaya, Layanan ini bertujuan untuk mendekatkan pengadilan dengan masyarakat.

8. Posbakum Online

Aplikasi ini merupakan sarana konsultasi hukum administasi negara maupun hukum acara peradilan tata usaha negara secara online dan tidak dipungut biaya, juga sarana untuk membuat janji dan permohonan secara online terhadap layanan

posbakum pada pengadilan tata usaha negara apabila masyarakat menginginkan layanan secara offline.

#### 9. Metaspace Virtual Tour

Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menjelajahi (PTUN) Bandung secara virtual. Dengan teknologi ini, pengguna dapat mengalami suasana ruang sidang, PSTP, dan area publik lainnya dalam PTUN Bandung tanpa harus berada di lokasi fisik.

#### ➤ **Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta**

Modernisasi peradilan melalui inovasi teknologi informasi merupakan kontribusi lembaga peradilan untuk menjalankan mandat dalam rangka mendukung kemudahan berusaha (Esay of Doing Business). Bahwa aparatur pengadilan tidak hanya dituntut penguasaan ilmu hukum tetapi juga harus menguasai teknologi informasi, dan merubah paradigma pelayanan one to one menjadi one to many. PTUN Jakarta sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi dapat terwujud apabila terlebih dahulu membangun perangkatnya baik SDM nya maupun infrastrukturnya.

Proses pemeriksaan perkara terlambat maka proses pemberian rasa keadilan akan terhambat, sehingga tidak tercapai asas berperkara sederhana, cepat dan biaya ringan. Semua dapat tercapai apabila saling bekerjasama, apabila bekerja sendiri-sendiri maka pelaksanaan tugas dan fungsi tidak akan maksimal. Oleh karena itu, PTUN Jakarta membuat inovasi yaitu SI PITUNG (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan), new e-visitor (buku tamu), dan e-case files versi 2 (aplikasi arsip perkara elektronik) berbasis Teknologi Informasi (TI).

Berikut inovasi yang ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

1. Aplikasi SI PITUNG versi 2 (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan)

PTUN Jakarta sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi pada awalnya belum memiliki aplikasi pelayanan chatbot Whatsapp sebagai Informasi pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat terkait persidangan. PTUN Jakarta melakukan inovasi berbasis teknologi informasi dengan optimalisasi media informasi dan pelayanan secara digital melalui pengembangan aplikasi layanan chatbot Whatsapp yang terintegrasi dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

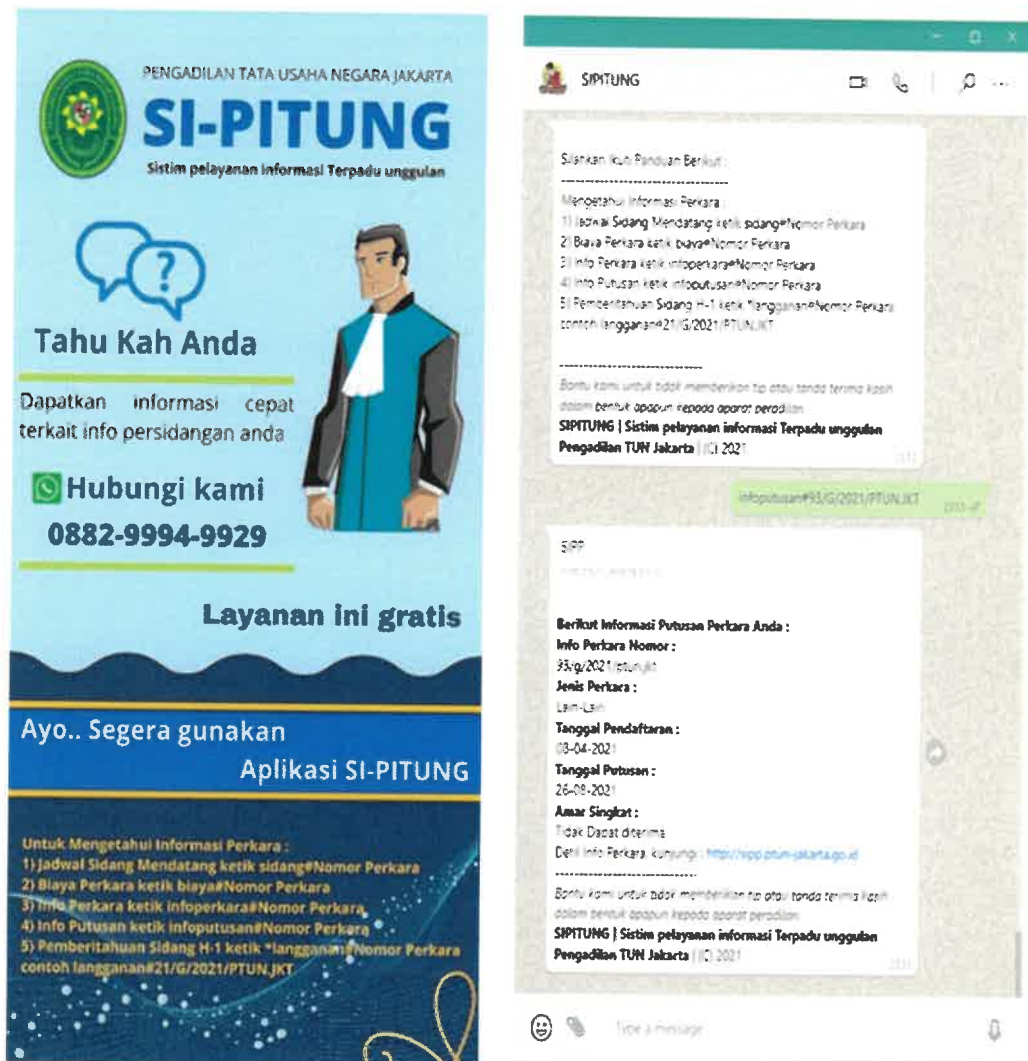
PTUN Jakarta membuat suatu inovasi berbasis teknologi informasi media informasi digital berupa aplikasi pelayanan chatbot Whatsapp yang diberi nama Aplikasi SI PITUNG ( Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan ).

Chatbot adalah software Artificial Intelligence (AI) yang dapat melakukan percakapan dengan pengguna dalam bahasa yang natural melalui aplikasi pesan, website, atau aplikasi mobile. Natural di sini maksudnya adalah kita seolah-olah bukan berbicara kepada robot atau sistem, melainkan seperti dengan admin CS pada umumnya. WhatsApp adalah aplikasi pengiriman pesan instan yang memungkinkan untuk berbagi tidak hanya pesan teks tetapi juga pesan multimedia seperti foto dan video melalui koneksi internet yang banyak digunakan di seluruh dunia dan paling populer dibandingkan aplikasi pengirim pesan lainnya.

Inovasi aplikasi SI PITUNG versi 2 ( Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan ) penerapannya di PTUN Jakarta merupakan pengembangan dari aplikasi chatbot Whatsapp yang terintegrasi dengan SIPP. Aplikasi Chatbot Whatsapp tersebut sepenuhnya optimal dalam memberikan informasi terkait perkara yang disidangkan di PTUN Jakarta kepada masyarakat sehingga dapat memudahkan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang cepat, valid

dan dapat dipercaya terutama bagi masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari PTUN Jakarta. Informasi layanan secara digital diperlukan sehingga optimalisasi aplikasi layanan chatbot Whatsapp dengan melakukan pengembangan baik dalam responsibilitas, publikasi dan data informasi.

Berikut tampilan inovasi Aplikasi SI PITUNG (Sistim Pelayanan Informasi Terpadu Unggulan).



## 2. *New e-visitor* versi 2 (Buku Tamu)

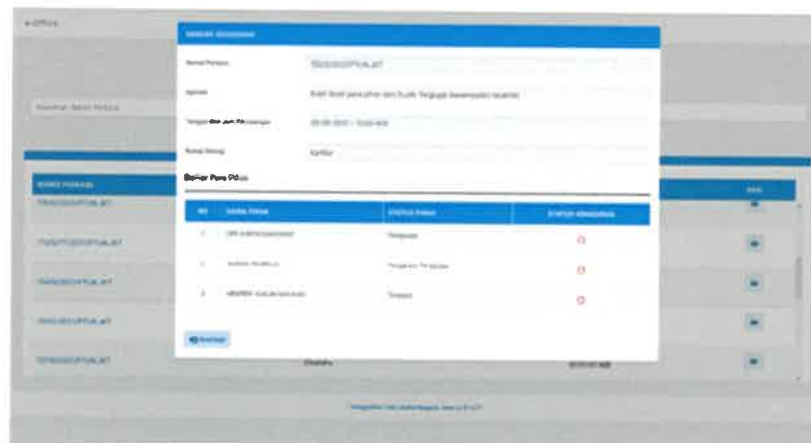
Inovasi PTUN Jakarta sebagai peradilan modern berbasis teknologi informasi yang kedua selanjutnya diberi nama *new e-visitor* (buku tamu). PTUN Jakarta pada awalnya sudah memiliki aplikasi *e-visitor* (buku tamu) sebagai Informasi pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat terkait persidangan. PTUN Jakarta selanjutnya melakukan

inovasi dengan menggunakan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan manajemen pelayanan pada pengadilan sangat dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan bermutu.

PTUN Jakarta dengan inovasinya melakukan pengembangan dari inovasi aplikasi *e-visitor* telah diperbaharui menjadi *new e-visitor* ( buku tamu ) sehingga dapat mencakup kebutuhan manajemen pelayanan buku tamu yang terintegrasi dengan layanan PTSP dan persidangan. Inovasi *new e-visitor* ( buku tamu ) mendukung inovasi yang sudah ada sebelumnya yaitu inovasi aplikasi *e-visitor*. Inovasi *new e-visitor* (buku tamu) mendukung inovasi yang sudah ada sebelumnya dan terintegrasi dengan layanan PTSP dan SIPP persidangan.

Inovasi *new e-visitor* ( buku tamu ) penerapannya di PTUN Jakarta merupakan pengembangan dari aplikasi *e-visitor* ( buku tamu ) yang terintegrasi dengan layanan PTSP dan SIPP persidangan. Aplikasi *new e-visitor* (buku tamu) merupakan instrumen/alat bantu yang diperlukan dalam menunjang kinerja PTUN Jakarta untuk lebih baik lagi dalam melayani masyarakat. Dengan menggunakan fitur barcode masyarakat bisa menggunakan smartphone dapat memilih bentuk layanan yang diinginkan.

Berikut tampilan inovasi Aplikasi *New e-visitor* (Buku Tamu).



### 3. Aplikasi Jak Aksi

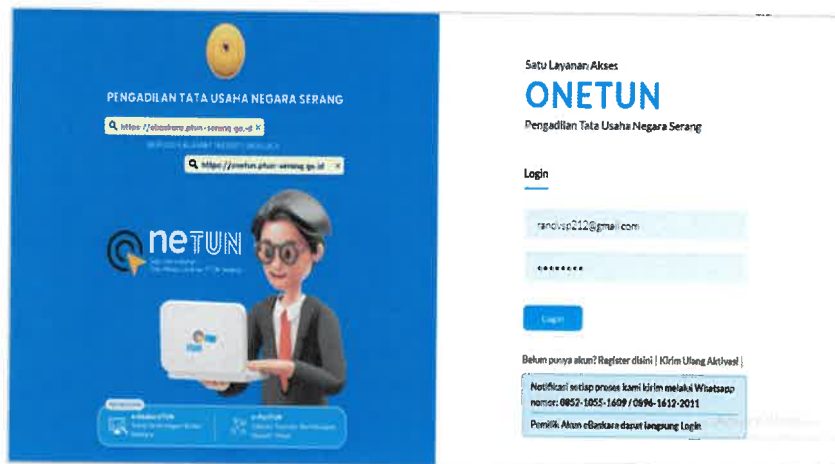


➤ **Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang**

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berupaya menciptakan aplikasi layanan pendukung dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 dan juga aplikasi-aplikasi lain yang merupakan inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Aplikasi Inovasi Pelayanan Peradilan telah diterapkan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yaitu :

No	Uraian	Keterangan
1.	<p>OneTUN  <a href="https://onetun.ptun-serang.go.id">https://onetun.ptun-serang.go.id</a>            (Satu Akses Layanan TUN Serang)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistem aplikasi layanan pemberian Surat Keterangan Bebas Perkara dan Salinan Putusan secara elektronik tanpa harus datang ke Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sehingga lebih efektif, aman dan akuntabel.</li> <li>- Fitur:               <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengajuan Surat Keterangan Bebas perkara</li> <li>● Pengajuan Salinan Putusan</li> </ul> </li> </ul>



Tampilan Aplikasi OneTUN

No	Uraian	Keterangan
1	#jaWAra# Asisten Digital PTUN Serang	- Aplikasi pencarian data Pengadilan Tata Usaha Negara Serang berbasis Bot WhatsApp adalah program atau perangkat lunak chatbot yang dapat digunakan secara khusus dalam aplikasi perpesanan terenkripsi WhatsApp populer, baik yang dapat diakses oleh publik ataupun keperluan internal.
		- Bertujuan membantu masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan data informasi perkara secara lebih cepat serta meningkatkan kecepatan pelayanan publik dan keterbukaan terkait pelayanan pengadilan.



Aplikasi Asisten Digital jaWAra

1. Survei Indeks Persepsi Dalam rangka pencegahan Korupsi & Persepsi Kualitas Covid-19, pelayanan PTSP

- |    |   |  |
|----|---|--|
|    | Pelayanan Elektronik                              | menerapkan mekanisme "TOUCH LESS" dengan menscan QR Code untuk mengakses layanan yang tersedia |
| 2. | Daftar Buku Tamu Elektronik                       |  |
| 3. | Daftar Hadir Persidangan Elektronik 'e-Attendance |  |
| 4. | Service Rating Elektronik                         |  |



Aplikasi Inovasi Akses Layanan *Touchless*

untuk Informasi Kehadiran  
Para Pihak Berperkara dalam  
Persidangan



Tampak muka aplikasi SIMKARA

8 SIMISTI

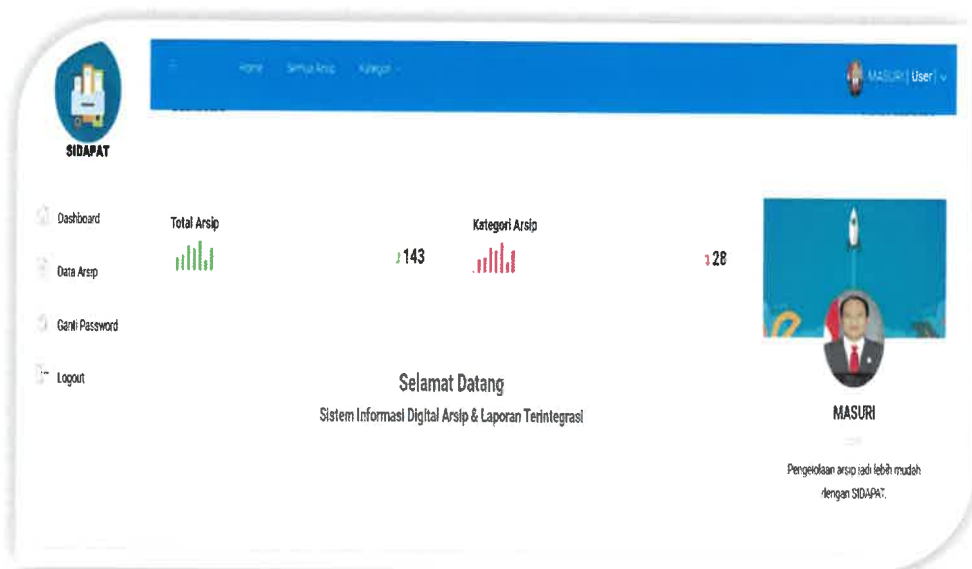
Aplikasi berbasis Web untuk  
administrasi pelayanan cuti  
aparatur di lingkungan  
Pengadilan Tata Usaha Negara  
Serang



### Tampak muka aplikasi SIMISTI

## 9 SIDAPAT

Sistem aplikasi bank data berbasis Web untuk unggah Arsip Digital dan Laporan secara mandiri dari tiap unit kerja.



### Modul User aplikasi SIDAPAT

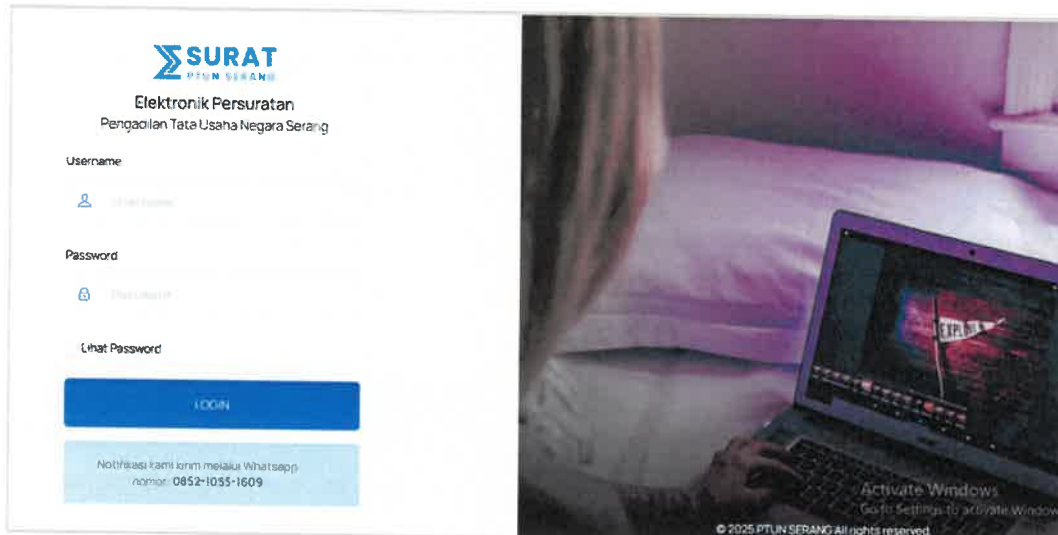
## 10 SIMARJAN

Aplikasi berbasis Web merupakan sistem monitoring dan evaluasi kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).



Menu Login Aplikasi SIMARJAN





Tampilan Aplikasi Tata Persuratan PTUN Serang

13 **PPID PTUNSRG**  
Berbasis Web dan Android

Sistem Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang dikelola sebagai dokumen informasi yang dimiliki oleh badan publik, berbasis web dan tersedia dalam basis android yang dapat diunduh pada playstore.



Tampilan Sistem PPID PTUN Serang

2. E-PS Sistem Pengelolaan Data Elektronik Persidangan Absensi, Pelaporan dan Setempat Monitoring Kegiatan Persidangan Setempat secara online.

**netUN** SATU AKSES LAYANAN PTUN SERANG PTIP PTUN SRG

**Daftar Pemeriksaan Setempat**

Show 10 entries Search:

No	ID PS	Tgl PS	No Perkara	Lokasi PS	Status	Aksi
1	U202500001	07 Jan 2026	30/G/2024/PTUN.SRG	-6.345983847533047, 108.75383526887248	Terlaksana	[Aksi]
2	U202400008	03 Des 2024	36/G/2024/PTUN.SRG	-6.123681346016411, 108.21632250135812	Terlaksana	[Aksi]
3	U202400005	18 Sept 2024	21/G/2024/PTUN.SRG	-6.3564398, 108.758573	Terlaksana	[Aksi]
4	U202400004	20 Agust 2024	15/G/2024/PTUN.SRG	-6.3241377, 106.7444356	Terlaksana	[Aksi]

Showing 1 to 4 of 4 entries Previous Next

Tampilan Sistem E-PS PTUN Serang

## **BAB VI**

### **PENGAWASAN**

#### **A. Internal**

Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya disesuaikan dengan rencana dan peraturan yang berlaku. Pada dasarnya tujuan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan tas tujuan yang akan dicapai.

1. Pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku baik berupa peraturan perundang-undangan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Surat Edaran Mahkamah Agung dan sebagainya antara lain :
  - a. Keputusan ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/006/SK/II/1994 dan Juklak tentang Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan.
  - b. Surat Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 1 Agustus 1994 Nomor : MA/Kumdil/207/VIII/1994.
  - c. Surat Edasaran Mahkamah Agung Nomor : 3 Tahun 1993 tanggal 11 Mei 1993 tentang Pembinaan Personil dan Kepemimpinan Pengadilan.
  - d. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : MA/KUMDIL/207/VIII/K/1994 tanggal 1 Agustus 1994 yang mengintruksikan penunjukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah dan Hakim Tinggi Pengawas Bidang ( di Pengadilan Tingkat Banding) dan dan Penunjukan Hakim Pengawas Bidang ( di Pengadilan Tingkat Pertama).
  - e. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Perdilan tanggal 24 Agustus 2006.

- f. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI.
  - g. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN/2559/KP.11.01/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 tentang Penunjukan Hakim-Hakim Tinggi Pengawas Daerah untuk setiap Pengadilan Tata Usaha Negara se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengawas Bidang di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membawahi 3 (Tiga) satuan kerja di wilayahnya telah melakukan Pembinaan dan Pengawasan rutin oleh Tim Hakim Tinggi Pengawas Daerah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan ini adalah bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja pada satuan kerja yang berada di bawah wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga tercipta suatu Peradilan yang Agung sebagaimana yang dicita-citakan dan terprogram dalam Blue Print Mahkamah Agung RI 2010 s/d 2035. Bahwa kedatangan Hakim Tinggi Pengawas Daerah intinya dalam rangka melakukan Pembinaan dan Pengawasan guna melakukan pemeriksaan mengenai Manajemen Peradilan, Administrasi Perkara, Administrasi Persidangan, Administrasi Umum, Pelayanan Publik dan menerapkan System Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di bidang Informasi dan Teknologi (IT).
3. Pengawasan yang dilakukan Hakim Tinggi Pengawas Daerah meliputi semua bidang baik administrasi perkara, administrasi umum termasuk laporan-laporan/pengaduan dari masyarakat pencari keadilan terhadap kinerja dan perilaku aparatur Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, sedangkan Hakim Tinggi Pengawas Bidang hanyalah menyangkut bidang-

bidang tertentu dalam lingkungan intern Kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

4. Dalam sistem pengawasan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan pada semua perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Wilayah Hukumnya dengan tujuan agar proses peradilan diselenggarakan dengan cara seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, adapun metode pengawasan yang diterapkan dalam melakukan pengawasan adalah sebagai berikut :

- a. Inspeksi Mendadak (Sidak)

Sistem ini dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/Tim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk mengawasi secara langsung jalannya peradilan tanpa memberitahukan sebelumnya, dapat dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan, baik intern Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun di Pengadilan Tingkat pertama se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

- b. Pengawasan Secara Berkala.

Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara berkala/periodic memerintahkan kepada Tim Hakim Tinggi Pengawas Daerah (Hatiwasda) untuk melakukan tugas pengawasan ke Pengadilan Tingkat Pertama secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi :

- Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan yang mencakup : administrasi persidangan, dan administrasi perkara .

- Pelaksanaan tugas pokok di lingkungan Kesekretariatan yang mencakup : administrasi kepegawaian, keuangan, inventaris, dan administrasi umum lainnya.
- Evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kepemimpinan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan public.

Selain Pembinaan dan Pengawasan ke Daerah di seluruh Satuan Kerja di bawahnya juga di lakukan pengawasan bidang di intern bidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali yang dilakukan oleh Tim yang di tunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

c. Penanganan Pengaduan

Penanganan Pengaduan adalah merupakan salah satu bagian dari pengawasan yang meliputi :

- Tingkah laku aparat peradilan;
- Manajemen kepemimpinan lembaga peradilan;
- Kinerja lembaga peradilan;
- Kualitas pelayanan public lembaga peradilan.

Adanya pengaduan/laporan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ditindak lanjuti dengan langkah-langkah sebagai berikut ;

- a. Meminta kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara bersangkutan untuk mengadakan penelitian dan pemeriksaan, serta melaporkan mengenai masalah yang diadukan tersebut kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- b. Meminta keterangan atasan pejabat yang dilaporkan langsung melalui telepon.
- c. Memanggil langsung pejabat yang dilaporkan untuk menghadap dan untuk diminta keterangannya.
- d. Menunjuk Tim Pemeriksa Khusus dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa pejabat yang dilaporkan tersebut.

e. Pemeriksaan langsung oleh Tim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Dalam hal-hal tertentu, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melaksanakan pemeriksaan langsung dengan menunjuk tim pemeriksa yang diketuai oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta atau oleh seorang Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi.

## **B. Evaluasi**

Dalam suatu Lembaga Pemerintah yang transparansi maka diadakan evaluasi secara internal, begitu juga di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta diadakan evaluasi secara internal baik di bagian Kepaniteraan maupun dibagian Kesekretariatan.

Pelaksanaan tugas administrasi umum secara garis besar sudah berjalan baik dan tertib, walaupun masih ada kekurangan. secara continue setiap ada rapat bulanan pada intinya mengevaluasi tugas-tugas kedinasan di masing-masing bidang.

Temuan-temuan dan permasalahan yang ditemukan oleh Tim Pengawas telah dibenahi dalam penyempurnaan pelaksanaan tugas disesuaikan arahan pemeriksa. Bidang pengawasan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah dilaksanakan dengan Evaluasi dan Monitoring ke dalam maupun ke Satuan-Satuan Kerja Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, yaitu dengan pengawasan secara melekat dengan tujuan Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan, tingkah laku aparat pengadilan dan kinerja pelayanan public.

Bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yakni melalui penyebaran kuesioner elektronik untuk survey kepuasan

pengguna layanan dilaksanakan per triwulan, serta rapat-rapat monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan rutin setiap bulan antara lain Monev Disiplin Pegawai dan Hakim, per triwulan antara lain Monev PPID/Monev terhadap layanan publik, Monev Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dan Monev Posbakum, Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan per Semester adalah Monev SOP dan Monev Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi, Dilaksanakan per Tahun antara lain Monev SPIP, Monev Manajemen Risiko, Monev Benturan Kepentingan dan Monev Gratifikasi.

## **B A B VII**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2025 ini, memuat uraian lengkap mengenai berbagai pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi tugas dan kewajiban yang diemban oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, baik itu program kerja, kebijakan strategis bidang peradilan dalam menjawab tantangan dan peluang alokasi anggaran dan realisasi 2025 serta rencana kerja tahun 2025 dan realisasi program tahun 2025.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta salah satu lembaga peradilan membawahi 3 (tiga) satuan kerja di wilayah hukumnya yaitu 3 (tiga) satuan kerja di daerah Propinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Propinsi Banten.

Bahwa tugas pokoknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tugas pokoknya memeriksa dan menyelesaikan perkara tingkat banding dari berkas perkara yang dikirim oleh 3 (tiga) Satuan Kerja di wilayah hukumnya, selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pasal 48 Jo Pasal 51, yang mana Undang-undang No. 5 tahun 1986 tersebut telah dilakukan 2 (dua) kali perubahan dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan yang kedua dengan Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang juga memeriksa dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama yang sesuai dengan pasal 48 Jo. Pasal 51 tersebut diatas.

Pemeriksaan perkara banding untuk tahun 2025 ini di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang diselesaikan secara tepat waktu berjumlah 316 perkara, jumlah tersebut diselesaikan waktu memutus antara 1-3 bulan semua, kalau dipersentasikan berjumlah 100 % diselesaikan dengan tepat waktu.

Penyerapan Anggaran DIPA tahun 2025 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan wilayah Hukumnya dari DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. terserap rata-rata 96 % sedangkan DIPA 05 dari Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. rata-rata 97 % bisa dikategorikan penyerapan tersebut bagus.

Dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara intern melakukan pengawasan baik oleh pimpinan dan Pejabat Struktural serta oleh Hakim-Hakim Pengawas Bidang.

Kami menyadari bahwa kinerja di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masih perlu ditingkatkan untuk mencapai hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan, kami juga menyadari bahwa pembangunan di bidang hukum tidak mungkin dilaksanakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam waktu singkat, untuk itu kami mengajak partisipasi aktif dari masyarakat maupun mencari keadilan dan siapa saja yang mempunyai kepedulian terhadap kemajuan pada Peradilan Tata Usaha Negara pada umumnya dan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada khususnya secara bersama-sama membangun secara terencana dan komprehensif.

Pada prinsipnya pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dan Pengadilan Tata Usaha Negara se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah berjalan dengan baik, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, namun begitu dalam pelaksanaan masih perlu adanya peningkatan kinerja agar lebih baik dalam hal pengadministrasian baik di bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yatu dengan perlu peningkatan kedisiplinan hingga akhirnya orestasi kerja dapat dicapai secara maksimal.

Demikian Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tahun 2025 semoga

Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua dalam meningkatkan pembangunan dalam bidang hukum, sehingga dapat terwujud tegaknya supremasi hukum dan keadilan di Indonesia.

## **B. REKOMENDASI**

### **PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masih banyak memerlukan sarana prasarana guna mendukung tugas pokok dan fungsinya dengan lebih baik lagi seperti :
  - Anggaran untuk pengadaan meubelair
  - Penambahan Anggaran pemeliharaan gedung kantor
2. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang khusus menangani perkara belum memadai, dari segi kualitas dan kompetensi dibidangnya, pada saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menangani bagian pekerjaan tersebut masih diisi oleh pegawai yang belum sesuai dibidangnya seperti Panitera Pengganti, Jurusita dan Honorer, oleh karena hal tersebut maka perlu adanya penambahan pegawai yang khusus menangani pekerjaan dibidang perkara seperti Analis Perkara sebanyak 5 (lima) orang pegawai, sehingga profesionalitas pekerjaan penanganan proses berkas di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan terwujud.
3. Rumah Dinas Hakim yang Representatif sangat dibutuhkan guna mendukung kinerja, selama ini di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta belum memiliki rumah dinas yang dapat dijadikan tempat tinggal yang nyaman bagi hakim-hakim, oleh karenanya perlu diadakan rumah dinas bagi Hakim-hakim yang Representatif
  - Jarak dengan kantor dekat
  - Tidak perlu luas yang penting fungsional.

### **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

1. Perlu adanya penambahan SDM (Sumber Daya Manusia) untuk mengisi bagian-bagian di sekretariat yang banyak di isi oleh honorer
2. Perlu adanya penambahan kendaraan dinas roda 4 bagi pimpinan
3. Perlu adanya penambahan Biaya untuk renovasi pembangunan rumah dinas Ketua, Wakil ketua dan Hakim yang saat ini dalam kondisi rusak berat dan tidak layak untuk di tempati
4. Perlu adanya peremajaan alat bantu kerja seperti PC, Laptop, printer dan scanner dalam menunjang teknologi informasi
5. Perlu adanya penambahan tenaga outsourcing untuk kebersihan, keamanan, dan supir pimpinan.

### **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG**

1. Pemberian anggaran pada setiap satker berbasis reward dan punishment karena selama ini satker yang telah berpeluang memperoleh piagam penghargaan baik dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun langsung dari Mahkamah Agung Republik Indonesi belum memperoleh reward yang nyata.
2. Perlu ditingkatkan peremajaan sarana & prasarana fasilitas kantor seperti pengadaan Laptop dan PC Komputer, printer, scaner serta mebelair, juga untuk mendukung mobilitas yang tinggi untuk operasional kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, berharap mendapatkan kendaraan Roda 2 dan Roda 4, guna menopang kinerja yang ada. Karena kendaraan yang ada sekarang masih belum mencukupi dan memadai.
3. Perlu peningkatan sarana halaman dan gedung kantor, seperti penambahan lantai gedung kantor karena ruang yang ada dirasa masih kurang dan lahan parkir serta halaman gedung kantor yang perlu direhabilitas dengan aspal yang baru karena aspal yang ada banyak yang terkelupas.

4. Rehabilitas untuk Back Drop ruang sidang diperlukan guna menambah estetika dan wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

#### **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG**

1. Perlu adanya penambahan anggaran untuk peningkatan sarana dan prasarana pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang antara lain: Ruang Sidang, Ruang Rapat, Ruang Hakim, Ruang Panitera Pengganti, Ruang Arsip Perkara maupun Kesekretariatan untuk Kendaraan Dinas, Meubelair, Fasilitas Perkantoran serta Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum memiliki Aula/Ruang Serbaguna yang dapat dipergunakan untuk berbagai kegiatan yang bersifat seremonial, karena selama ini masih memanfaatkan ruang sidang jika disaat yang bersamaan ada jadwal sidang maka pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi terganggu.
3. Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tata Usaha Negara Serang belum memiliki Rumah Dinas, hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi Satker ketika pergantian pimpinan yang seyogyanya pimpinan yang baru hanya cukup membawa koper saja namun hal yang terjadi di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pimpinan yang baru akan direpotkan dengan mencari tempat tinggal sewa untuk ditempati sebagai rumah dinas.
4. Perlu tambahan anggaran untuk pembangunan pagar dan penataan area parkir tamu/pengunjung oleh karena jika pelebaran jalan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dirampungkan maka area parkir untuk tamu/pengunjung akan tergusur, dan lahan parkir akan dialihkan ke tanah sebelah kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Serang sebagai pengganti yang telah disepakati atas lahan yang tergusur untuk pelebaran jalan Provinsi Banten.
5. Perlu penambahan tenaga pegawai untuk pekerjaan yang memerlukan teknis tertentu antara lain: teknisi jaringan, arsiparis, pustakawan, analis perencanaan, analis pelaporan, pranata sarana dan prasarana, serta pranata keuangan.

Demikian yang dapat kami rekomendasikan semoga Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan mempertimbangkannya.